

HASIL PENELITIAN
EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI DESA PAKU,
KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLMAN PROVINSI
SULAWESI BARAT

Oleh:

AHMAD SAPUTRA IMBAR

4516021045

UNIVERSITAS

BOSOWA



FAKULTAS ISIPOL JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2020-2021

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat

Nama Mahasiswa : AHMAD SAPUTRA IMBAR

Nomor Stambuk : 4516021045

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 14 september 2020

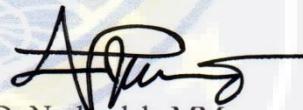
Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Natsir Tompo, M.Si.
NIDN.0901065901



Dr Nurkaidah, MM
NIDN. 0031126305

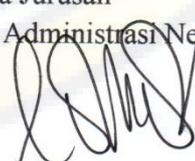
Mengetahui ;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Arief Wicaksono, SIP,MA
NIDN. 0927117602



Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari senin tanggal empat belas september dua ribu dua puluh skripsi dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku Kecamatan Binuan, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat”**

Nama Mahasiswa : Ahmad Saputra Imbar
Nomor Stambuk : 4516021045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

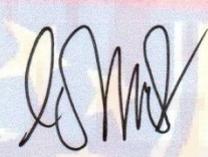
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono, S.IP, M.A
NIDN.0927117602


Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

TIM PENGUJI

1. Drs Natsir Tompo, M.Si
2. Dr. Nurkaidah, MM
3. Dr. Dra, Hj. Juharni, M.Si
4. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos, M.Si


()
()
()

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Saputra Imbar

Nim : 4516021045

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pendistribusian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sangsi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar ,07 September 2020

Penulis,



Ahmad Saputra Imbar
45160210045

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Penyusunan proposal di maksudkan untuk memenuhi berbagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kesulitan dan rintangan di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang di miliki. Namun berkat bantuan dan dorongan yang di berikan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan proposal ini sesuai dengan rencana.

Proposal ini penulis Persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah ikhlas memberikan semangat dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi yang telah diberikan, beserta tak henti-hentinya mendoakan penulis agar penulis sukses dalam mengapai cita-cita. Terima Kasih telah meluangkan waktu untuk mengasuh, mendidik dan membimbing perjalanan hidup penulis yang di iringi doa yang begitu tulus buat kakak dan adik-adik penulis dan keluarga besar penulis terima kasih sudah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian study.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Saleh Pallu. M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Arief Wicaksono, S.IP.MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

3. Ibu Nining Haslinda Zainal S.Sos, M.Si. selaku ketua Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Drs Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing proposal saya
5. Bapak Dr. Nurkaidah, MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai Fisip Universitas Bosowa Makassar
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan “ REFOLUSI 16” yang telah banyak memberikan perjalanan dan kebersamaan selama berada dalam masa perkuliahan
8. Bapak Kepala Desa Beserta Masyarakat di Desa Paku Kabupaten Polman yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan fasilitas dalam pengumpulan data dan informasi yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

Kepada kedua Orang Tua saya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan proposal ini.

Akhinya penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi penulis dan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua .”Amin.

Makassar, September 2020
Penulis

Ahmad Saputra Imbar

ABSTRAK

AHMAD SAPUTRA IMBAR, Nomor Pokok **4516021045**, Efektivitas Pendistribusian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku (Studi Pada Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polman).

Pendistribusian Dana Desa untuk membiayai program pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui: 1) pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di Desa Paku, 2) faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paku. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di Desa Paku sudah cukup berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri dan peraturan bupati Polewali Mandar yang berlaku dan faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paku. sudah cukup berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan di tata lebih baik lagi seperti komunikasi dalam hal sosialisasi dana desa pada masyarakat harus secara langsung dan tidak menggunakan perwakilan masyarakat yang hadir dalam sosialisasi dana desa tersebut. Dalam pendistribusian dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lebih mengutamakan transparansi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana tersebut

Kata Kunci: Efektivitas Pendistribusian Dana Desa, Kesejahteraan, Masyarakat Di Desa Paku

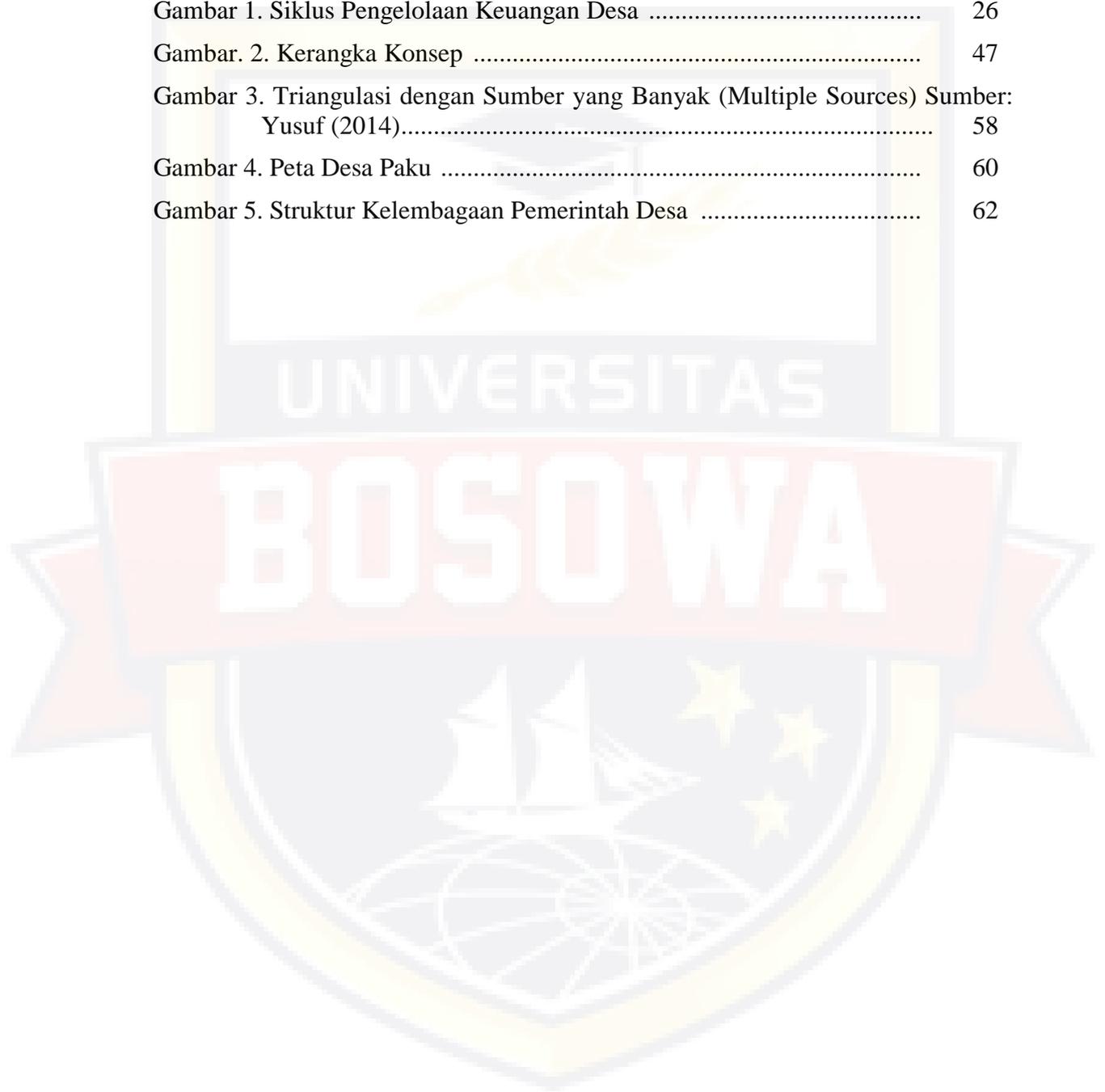
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	
.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pendistribusian.....	6
1. Pengertian Efektivitas.....	6
2. Pengertian Distribusi	9
3. Fungsi Saluran Distribusi	11
4. Kebijakan Saluran Distribusi.....	13
5. Standar Pelayanan Distribusi.....	14
B. DESA	15
1. Pengertian Desa	15
2. Unsu-Unsur Desa.....	15
3. Fungsi Desa	16
4. Potensi Desa	16
5. Dana Desa.....	17
6. Tujuan Dana Desa	20
7. Penyaluran Dana Desa.....	20
8. Penggunaan Dana Desa	20
9. Pengelolaan Dana Desa	24
10. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa	28
11. Pembangunan Desa	33
12. Sasaran Pembangunan Desa.....	36
13. Pendekatan Pembangunan Desa.....	37
C. Kesejahteraan	38
D. Keterkaitan Antara Pendistribusian Dana Desa Dengan Kesejahteraan	40
E. Impelementasi Kebijakan.....	41
F. Kerangka Konsep	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48

A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian	49
D. Deskripsi Fokus	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Jenis dan Sumber Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Teknik Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah Desa	59
2. Kondisi Desa Paku.....	60
3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa.....	61
4. Visi Dan Misi Desa Paku.....	64
B. Hasil Penelitian	65
1. Pengadministrasian Dalam Mendistribusikan Dana Desa Di Desa Paku	65
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku	74
C. Pembahasan.....	82
1. Pengadministrasian Dalam Mendistribusikan Dana Desa Di Desa Paku.	82
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku	85
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	26
Gambar. 2. Kerangka Konsep	47
Gambar 3. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (Multiple Sources) Sumber: Yusuf (2014).....	58
Gambar 4. Peta Desa Paku	60
Gambar 5. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang berkaitan dengan masalah desa selalu menjadi topic yang paling menarik untuk di pilah dan di analisis apalagi perihal di desa tersebut berkaitan langsung dengan masalah anggaran dana desa mengingat anggaran dana desa tersebut sring kali di salah gunakan demi kepentingan pribadi sehingga anggaran yang semestinyadi salurkan untuk kepentingan public terkhusus pada pembiayaan infrastruktur.malah terkandas dan masuk ke dalam kantong aparatur desa hal ini akan terbaca dari tidak adanya perkembangan yang begitu signifikan dari desa tersebut dan tidak adanya transparansi mengenai di salurkan kemana anggaran dana desa tersebut oleh aparatur desa padahal semua masyarakat tahu kalau semua desa mendapatkan dana desa.

Untuk kepentingan infrastruktur yang di salurkan oleh pemerintah pusat padatiap-tiap desa permasalahan yang serupa pun terjadi di Desa Paku dimana di Desa Paku tersebut para aparatur desa tidak menyalurkan secara efektif dana yang dari pusat untuk kepentingan infrastruktur sehingga mengakibatkan Desa Paku pun tidak mengalami perkembangan infrastruktur yang begitu signifikan akaibat dana desa tersebut tidak di salurkan secara baik oleh pemerintah desa dan anggaran tersebut di tututap rapat-rapat dari tatpan publik atau pandangan masyarakat yang ada di desa tersebut sehingga masyarakat mulai menganggap bahwa memang ada sejenis konspirasi bisu

yang sengaja di lakukan oleh aparaturnya di balik tidak ada perkembangan infrastruktur yang ada di desa tersebut.

Fenomena yang berkaitan dengan tidak adanya transparansi anggaran dana desa serta kurangnya infrastruktur di desa-desa menjadi momok yang paling enak untuk di bicarakan lebih tajam lagi mengingat penyakit tidak di transparansi anggaran dana desa tersebut merupakan sebuah penyakit yang begitu akut yang di alami oleh aparaturnya pemerintah dan lebih khususnya adalah pemerintah desa.

Ada permasalahan yang paling mengerikan lagi selain dari masalah transparansi anggaran dana desa serta uangnya di kantongin oleh pemerintah desa yaitu masalah ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya yang terkhususnya lagi adalah menyangkut infrastruktur kehidupannya masyarakatnya bila hal ini terus di biarkan terjadi maka perkembangan desa tersebut bukannya malah tambah maju melainkan malah tambah kacau hal ini yang menjadi perhatian serius saya untuk saya analisis lebih dalam terkait motif di balik tidak di transparansi anggaran dana desa oleh pemerintah desa tersebut serta tidak jelasnya di arahkan kemana anggaran dana desa tersebut inipun masih menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk di telusuri lebih tajam lagi mengingat maju dan mundurnya sebuah desa tergantung dari pemerintahnya bila pemerintahnya ngawur dalam transparansi anggaran dana desa dan transparansinya dana desa maka ngawur pulalah tata pengelolaan anggaran dana desa implikasinya desa pun mengalami ketertinggalan jauh dari desa-desa yang lainnya pemerintah desa itu ibaratkan seperti nahkoda arah dan gerak kapal tergantung dari nahkodanya maju mundurnya sebuah

peradaban tergantung dari pemimpinnya begitu juga berkembang dan kandasnya sebuah desa tergantung dari pemerintah desanya tersebut.

UUD tentang Desa telah memosisikan desa sebagai akar dari pembangunan sebuah bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. Dan Desa di beri prioritas kewenangan untuk mengelola dan mendayagunakan sumber dana adalah lebih mencukupi untuk mendapatkan memiliki potensi yang dapat menghasilkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Undang Undang No 6 tahun 2014 mengenai soal kampung akan menjadi tonggak untuk mengubah perspektif kerajaan kampung. Kampung ini tidak hanya dapat menganggap itu sebagai proyek perkembangan, tetapi juga dapat menjadi pelaku utama sekaligus sebagai salah satu tombak terdepan untuk pembangunan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Desa dilimpahkan tugas untuk manajemen dan mengatur perihal pemerintah desa sebagai alat untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan salah satu aspirasi dan cita-cita dari masyarakat desa terkait. oleh karenany setiap desa pada . tiap tahunnya Pemerintah Pusat telah mendonorkan Dana Desa yang cukup memadai untuk keperluan pembangunan infrastruktur demi keperluan desa hal ini pun di rasakanoleh desa paku. proses pembagian anggaran dari tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai keuangan perkampungan, dengan memberi kuasa kepada kampung untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara bebas dan bebas berdasarkan konsep autonomi kampung, dimana desa mempunyai hak untuk mendapatkan

belanjawan demi melaksanakan kewibawaan ini untuk menyokong pelaksanaan pembangunan dan pembangunan di peringkat desa.

Dana Desa berasal dari APBN untuk diperuntukkan untuk Desa yang disediakan melalui APBD kabupaten atau kota dan sangat diutamakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Paku. Tujuan Dana Desa adalah untuk mempercepat layanan di Desa, sebagai langkah untuk meredakan kemiskinan dan memajukan ekonomi Desa, untuk mengatasi jurang dan perkembangan yang tidak baik antara desa dan untuk memperkuat dan memperkuat masyarakat desa sebagai salah satu pembangunan pelakon.

Kampung Paku adalah salah satu kampung di Kabupaten Binuang, Kabupaten Polman. Setiap kampung disahkan menerima geran dari pemerintah yang disebut Dana Desa. Menurut pemerhatian sebagai calon penyelidik yang terlibat secara langsung dalam komuniti Paku Village, mereka mengatakan bahawa belum dapat dilihat secara khusus bahawa penyediaan sumur bantuan kerajaan, terutama bagi orang kurang mampu yang tidak memiliki telaga. Ia berbeza dengan kampung jiran yang telah melihat kemajuan dan perubahan dalam pembangunan fizikal kampung. Ini menunjukkan jika tidak sesuai atau terdapat jurang dan krisis.

Tujuan Peruntukan Membaca Dana Desa "Mengatasi jurang pembangunan infrastruktur antara kampung" adalah masalah sebenar yang ada di Desa Paku. Peruntukan Dana kampung belum secara maksimal sesuai objektif Dana Desa (DD). Berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas, diharapkan seluruh Kerajaan Desa dapat mengoptimumkan anggaran Dana

Desa (DD) dimiliki sehingga anggaran Dana Desa (DD) dapat menggerakkan roda ekonomi Desa, sehingga pembangunan Desa akan meningkat.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dan dikaji dalam penelitian ini dapat menemukan sebagai berikut.:

1. Bagaimana pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di Desa Paku?
2. Faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paku?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Bagaimana tentang tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di Desa Paku.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paku.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat desa, khususnya perangkat desa, untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan saat melaksanakan program dana desa yang tepat dan sesuai tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat..
- b. berharap bisa dianggap sebagai pengetahuan baru mengenai sejahtranya publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Pendistribusian.

1. Pengertian Efektivitas

Dalam setiap organisasi, keberkesanan adalah elemen utama aktiviti demi menggapai yang dituju atau objektif demi menentukan. Bahasa berkesan asal mu asal kata Inggeris, iaitu berkesan, yang bermaksud berjaya atau sesuatu yang berjaya dilakukan (Ismayanti, 2015:447).

Keberkesanan terbuat ke bahasa "kesan" dan mempergunakan menjadi kejadian. Keberkesanan dapat dilihat sebagai penyebab pemboleh ubah lain. Keberkesanan bermaksud bahawa tujuan yang telah dirancang dapat dicapai atau dengan kata lain, sasaran dapat dicapai kerana proses aktiviti. Keberkesanan kata tidak dapat disamakan dengan kecekapan kata, kerana keduanya mempunyai makna yang berbeza walaupun dalam pelbagai penggunaan kata kecekapan berkait rapat dengan keberkesanan kata. Kecekapan menyiratkan perbandingan antara kos dan hasil, sementara keberkesanan secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan (Ismayanti, 2015:447).

Keberkesanan kata tidak dapat disamakan dengan kecekapan, kerana kedua-duanya mempunyai makna berbeza meskipun berkongsi penggunaan kata kecekapan berkait rapat dengan keberkesanan kata. Kecekapan menyiratkan perbandingan antara kos dan hasil, sementara keberkesanan secara langsung berkaitan untuk menuntaskan dituju. Kamus Ilmiah Popular memaknai keberkesanan untuk kesesuaian memakai, hasil penggunaan

perantara dituju sokongan (Alkadri dkk 2019:678). Keberkesanan adalah salah satu dimensi produktiviti, yang membawa kepada pencapaian kerja maksimum, iaitu pencapaian sasaran yang berkaitan dengan kualiti, kuantitas dan waktu. Robbins mendefinisikan keberkesanan sebagai tahap keberhasilan perusahaan dari dan baik waktu sebentar dan waktu panjang (Ruwaina, 2019:326).

Keberkesanan adalah penyempurnaan kerja bukan sahaja dari segi mencapai matlamat Dari segi akurasi masa untuk menggapai tersebut. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa keberkesanan berkaitan dengan masalah masa. Suatu aktiviti dikatakan berkesan sekiranya aktiviti tersebut berjaya diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dengan kata lain tepat pada waktunya (Pratama, 2018:654).

Sedangkan efektivitas, menurut Sedarmayanti (2004:6) keberkesanan adalah setiap aktiviti dan proses institusi Tujuannya untuk membuat sesuatu yang benar-benar pas keperluan melalui penggunaan terbaik ke pelbagai ada (Sedarmayanti, 2004:6).

Stoner dalam Kurniawan (2017:106) menekankan pentingnya keberkesanan organisasi dalam mencapai matlamat organisasi dan keberkesanan adalah kunci kejayaan sesebuah organisasi. Pendapat ini juga disokong oleh Miller, keberkesanan dimaksudkan sebagai tahap sejauh mana sistem sosial mencapai tujuannya. Menurut Hall in Alkadri (2019: 679) keberkesanan adalah sejauh mana organisasi mencapai matlamatnya. Dapat menyimpulkan untuk konsep efektivitas dengan untuk perusahaan berikan sebagai berikut: tahap di mana organisasi menjalankan aktiviti atau

fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan alat dan sumber daya yang ada secara optimum. Kegiatan atau program yang dijalankan oleh organisasi boleh dikatakan berkesan sekiranya mereka telah mencapai tujuan atau objektif yang telah ditentukan (Ruwaina, 2019: 531).

Efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti:

- a. Jumlah sumber daya, dana, fasilitas, dan infrastruktur yang ditentukan / terbatas yang tersedia untuk organisasi atau perusahaan.
- b. Keseluruhan dari kualiti melayani dan memberikan tawaran ditentukan untuk mencapai tujuan..
- c. Batas waktu penyelesaian pekerjaan mengikuti yang telah ditetapkan dahulu.
- d. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan (Siagian, 2018:18)

Sumber manusia adalah faktor penting dalam mencapai keberkesanan organisasi, yang terdiri daripada kemahiran, pengetahuan, dan sikap. Sekiranya usaha dilakukan untuk meningkatkan kemahiran, kebolehan dan sikap, ini akan mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka sehingga keberkesanan yang lebih baik dapat dibentuk dalam organisasi. Keberkesanan adalah hubungan antara output dan tujuan atau objektif yang mesti dicapai. Definisi keberkesanan pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian matlamat atau sasaran dasar. Kegiatan operasi dikatakan berkesan sekiranya proses aktiviti ini mencapai objektif akhir dan matlamat dasar (berbelanja dengan bijak). Mahsun menambah bahawa efektivitas adalah ukuran berhasil adakah

organisasi mencapai matlamatnya. Sekiranya sesebuah organisasi berjaya mencapai matlamatnya, maka organisasi tersebut dikatakan dapat berjalan dengan berkesan (Priyono et al., 2018: 17).

Dari beberapa implikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah terwujudnya suatu tujuan yang disepakati dan dapat dikerjakan dari time tertentu dari mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, dan nyatakan bahwa perusahaan telah bergerak menjadi eektife.

2. Pengertian Distribusi

Distribution stems from the English distribution which means distribution. While the root word is to distribute, based on John M's English Indonesian Dictionary, Echols and Hassan Shadilly in Damsar (2016:93) Berarti berbagi, distribusi, distribusi, distribusi, dan agensi.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian dimaksudkan untuk disebarluaskan (disebarkan, disebar) ke banyak orang atau beberapa lokasi. Oleh karena itu, berdasarkan referensi di atas, distribusi dapat diartikan sebagai proses mendistribusikan barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kasus penyiaran, peralatan dan target diperlukan untuk memastikan penyiaran yang lancar..

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi penjualan yang terpenting dalam penjualan, mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen berdasarkan jumlah dan waktu yang ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan masalah yang sangat penting karena memperlambat distribusi barang atau jasa kepada konsumen atau konsumen..

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai konsep pengedaran, berikut adalah pendapat beberapa ahli:

Menurut Gugup Kismono (2001: 364), distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan konsumen industri.

Menurut Sofian Assuri (2004: 83) Sirkulasi adalah suatu lembaga yang menjual produk berupa barang atau jasa dari produsen produk kepada konsumen..

C. Glenn Walters (2002: 295) di Angapore, divisi adalah sekelompok pedagang dan agen yang menggabungkan nama produk dengan transfer fisik untuk memanfaatkan pasar tertentu.

Distribusi adalah aktivitas yang melibatkan pembelian dan penggunaan semua bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi, yang mencakup kontrol atas produksi dan pembuangan bahan dan faktur.

Keegan Distribution (2003: 136) adalah sistem yang menghubungkan produksi dengan pelanggan, sedangkan saluran konsumen dirancang untuk meletakkan produk di tangan orang, dan saluran produk industri mengirimkan produk ke produsen atau organisasi yang menggunakan produk tersebut. Selama produksi atau operasi harian.

3. Fungsi Saluran Distribusi

Memandangkan menyediakan pengedaran yaitu bagian untuk menceritakan tempat membagikan untuk berbeza teruntuk pelbagai institusi perniagaan (seperti pengeluar, pemborong dan peruncit), aktiviti saluran pengedaran mesti dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan..

Saladin (2000: 121) mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan elemen penting dalam penjualan, dan merupakan salah satu proses yang digunakan perusahaan untuk menyimpan dan memasarkan produknya.

Swastha (2003: 61) menjelaskan bahwa fungsi saluran penyiaran meliputi delapan hal sebagai berikut::

1. Menjadi penengah antar pemakai dan menciptakan.
2. Saluran distribusi menyediakan fungsi tambahan untuk fungsi penjualan seperti penjualan kredit.
3. Saluran distribusi terlibat dalam harga.
4. Jalur distribusi aktif dalam advokasi.
5. Melalui media konsumen dapat membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan.
6. Saluran distribusi mengurangi pembiayaan dan bharga.
7. Saluran komunikasi adalah komunikasi antara pembuat dan pemakai.
8. Saluran distribusi menyediakan konsumen barang atau jasa.
9. Saluran penyalur memberikan layanan lebih terhadap pemakai.

Dalam aktiviti pengedaran barang, kami untuk mengetahui pribahasa pengedaran fizikal. Menurut Stanton, (2002: 89) pengagihan fizikal yaitu semua aktiviti untuk boleh berkaitan untuk perpindahan barang untuk betul tepat sasaran..

aktiviti penyaluran kekuatan (logistik pemasaran) untuk mendapatkan tugas . sebagai tugas dari aktiv penyaluran kekuatan tersebut diantaranya:

- 1) Merencanakan
- 2) Percobaan, dan
- 3) Mengendalikan jalur bahan, barang siap dan maklumat yang berkaitan secara fizikal dari tempat asal hingga ke tempat pengguna untuk memenuhi keperluan masyarakat.

Sangat detail, aktiviti dalam taburan fizikal dapat dibahagikan kepada lima kumpulan, yaitu:

1. Menentukan tempat gudang atau penyimpanan barang.
2. menentukan tempat pengendalian barang.
3. Penggunaan sistem kawalan inventori.
4. Pembentukan tata cara untuk memproses pesanan
5. Pemilihan kaedah pengerimanan.

Oleh itu dapat difahami bahawa pengedaran fizikal adalah aktiviti mengedar produk yang sangat penting di setiap organisasi atau kampung. Ini dapat dilihat dari beberapa tugas yang terlibat dalam pengedaran fizikal seperti merancang, melaksana dan mengawal aliran bahan dalam organisasi sehingga barang yang akan diedarkan dapat diedarkan sesuai dengan aliran dan keadaan yang berlaku dalam proses pengedaran..

4. Kebijakan Saluran Distribusi

Dasar jalur pengedaran institusi dilalui syarikat membuat pembeli agar lebih mudah biasanya di artikan sebagai perantara. menjalankan jalur pengedaran, lebih baik ketetapan sasaran untuk jalur pengedaran yang harus di dahului.

Warren J. Keegan (2001, hal. 23) menjelaskan bahawa saluran pengedaran adalah organisasi rangkaian berdiri daripada tempat dan institusi menjadi kelompok menjalankan semua aktiviti yang diperlukan untuk menghubungkan pengeluar dengan pengguna . Sementara itu, menurut Philip Kotler (1999: 98), tugas penting yang mesti dilaksanakan oleh anggota saluran pengedaran adalah:

- a. Kumpulkan maklumat penting untuk penyelidikan, perancangan dan pertukaran.
- b. Mempromosikan, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif mengenai cadangan.
- c. Membina hubungan, kejayaan, dan hubungan dengan bakal pembeli.
- d. Secara serentak, penawaran dipasang berdasarkan permintaan pembeli.
- e. Usaha dapat dilakukan untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga, hal-hal lain yang berkaitan dengan pemindahan atau penguasaan tuan tanah.
- f. Pengedaran, pengangkutan dan penyimpanan barang secara fizikal.
- g. Untuk menampung kos pembiayaan, permintaan dan saluran penjualan pengedaran.

5. Standar Pelayanan Distribusi

Piawaian perkhidmatan adalah spesifik dan mesti diukur tujuan yang ditentukan oleh syarikat berkenaan dengan aktiviti pengedaran fizikal mereka. Pembahagian fizikal bermula dengan pertimbangan, iaitu memenuhi keperluan pengguna (Gugup Kismono, (2001: 364).

Menurut Moenir (2000: 16) Perkhidmatan yaitu berjalan memenuhi keperluan secara langsung melalui aktiviti orang lain. Sementara itu, Kertajaya (2006: 421) Perkhidmatan adalah salah cikal bakal barang harga untuk dikasih masyarakat. Kerana pokok penting ia untuk melakukan baerter dengan syarikat untuk yang sangat bernilai bagus untuknya.

Untuk sekali penjualaln pengedaran, melebihi pengeluar dan pengguna seterusnya menginginkan keinginan mengenai kualiti dan produk yang akan diperdagangkan sehingga standardisasi barang diperlukan sehingga barang yang akan diedarkan seperti menjadi espentasi. Dalam hal ini, standard layanan pengedaran berisi dasar hukum, persyaratan, prosedur layanan, waktu tuntas, harga perkhidmatan, produk perkhidmatan, kemudahan yaituinfrastruktur, kompetensi pegawai dalam menyediakan perkhidmatan, pengendalian dalaman, penanganan aduan dan jaminan layanan pengedaran..

B. DESA

1. Pengertian Desa

UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa yaitu kesatuan masyarakat yang sah dengan hak untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, prakarsa masyarakat, hak lokal, atau batas wilayah dengan hak untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik. Indonesia. Desa merupakan hasil gabungan dari kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya. Hasil dari aliansi ini dapat memunculkan suatu tampilan konkrit atau eksternal di permukaan yang disebabkan oleh faktor fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan budaya di permukaan dan berkaitan dengan bidang dll. (Yustisia, 2015).

2. Unsu-Unsur Desa

- a. Pengeluaran kawasan, penggunaan tanah dan tidak digunakan dan penggunaannya meliputi elemen lokasi, kawasan dan sempadan yang merupakan lingkungan geografi tempatan dalam arti tanah..
- b. Penduduknya merangkumi jumlah, peningkatan, kepadatan, taburan, dan penghidupan penduduk kampung.
- c. Urutan hidup, dalam hal ini pengaturan sosial dan interaksi sosial penduduk kampung.
- d. Lokasinya selalu jauh dari kawasan bandar dan pusat tumpuan orang ramai

3. Fungsi Desa

- a. Di pedalaman atau daratan, ia berperanan dalam menyediakan makanan kepada makanan utama atau masyarakat, seperti beras, jagung, dan ubi kayu, selain kacang, kacang, buah-buahan, dan makanan lain dari haiwan lain..
- b. Sekiranya kita melihat undang-undang dari sudut analisis ekonomi, bahan mentah (bahan mentah) dan tenaga kerja (tenaga kerja).
- c. Dari segi kegiatan kerja, kampung ini dapat menjadi desa pertanian, desa produksi, desa perindustrian, perkampungan nelayan

4. Potensi Desa

Potensi desa terdiri daripada dua perkara, potensi fizikal dan potensi fizikal. Potensi fizikal:

- a. Dari segi penggalian dan sumber mineral, ia adalah sumber tanaman yang merupakan sumber tanaman dan mata pencarian.
- b. Dari segi air, sumber air, keadaan atau kualiti air dan pengurusan air untuk pengairan, pertanian dan keperluan harian.
- c. Iklim memainkan peranan penting bagi perkampungan pertanian.
- d. Ternakan, sebagai sumber tenaga, sumber makanan dan sumber kewangan ternakan di kampung.
- e. Manusia dalam erti kerja sebagai pengurus dan pengeluar tanah.

Potensi nonfisis:

- a) Rakyat perkampungan menjadi semangat saling bantu atau kerja samasecara kekeluargaan dan dapat merupakan suatu power masyarakat

yang berproduksi dengan kekuatan untuk mengerjakan gotong royong atau saling bantu satu sama lain .

b) Lembaga-lembaga kemasyarakatan, edukasi atau wadah kemasyarakatanl perkampungan yang saling suport.

c) Pekerja atau pamong perkampungan yang memiliki ide dan tegas sumbermenurupakan ujung tombak untuk pembangunan desa

5. Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah suatu keharusan atau kewajiban Kerajaan Pusat untuk mengagihkan pemindahan belanjawan perkampungan di APBN Ungkapan pengiktirafan dan penghargaan negara terhadap kawasan luar bandar. Fokus pada penggunaan DD telah ditentukan secara langsung oleh peraturan Menteri Desa, pengembangan wilayah yang tidak bahagia dan penempatan kembali Republik Indonesia, yang merupakan salah satu (sembilan program) Navachita dalam pelaksanaan pemerintah. Usaha untuk memajukan Indonesia melalui program ADD.

Penerbitan dana asing adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota untuk mensubsidi anggaran desa dari Dana Pengagihan Umum (DAU), yang merupakan bagian dari Dana Peruntukan Hasil (DBH) dan Dana Balancing. 2017).

Proses membiayai kewangan luar bandar melalui mekanisme pemindahan dari Perbendaharaan Provinsi (RKUD) telah berlangsung sejak sekian lama. PP No. Di Desa 72, pada tahun 2005, pemerintah daerah memperuntukkan dana dari pemerintah pusat dan mengirimkannya ke akaun perkampungan yang disebut Peruntukan uang perkampungan. (ADD).

Definisi ADD dalam PP No. 72 tahun 2005 yaitu uang yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang berasal dari sebahagian dana keseimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota. Bahagian dana penyeimbangan kewangan pusat dan wilayah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% diagihkan secara berkadar kepada setiap kampung (D. Kurniawan, 2012).

Peraturan mengenai ADD di PP. 72 tahun 2005 kemudian diatur dengan lebih terperinci di Permendagri No. 37 tahun 2007 mengenai panduan pengurusan kewangan dana desa di Permendagri No. 37 tahun 2007 menerangkan tujuan ADD, prosedur untuk mengira jumlah anggaran desa, mekanisme pengagihan, penggunaan dana untuk kebertanggungjawaban (Baharim, 2017)

Pengurusan Kewangan ADD adalah bahagian yang tidak dapat diputuskan daripada pengurusan Kewangan Desa di APBDes / APBG kerana menguruskan Kewangan Peruntukan uang kampung seperti berikut:

- a. Semua aktiviti di biayai ke penganggaran atau alokasi uang kampung (ADD) diplaningkan, dilakukan secara transparansi dengan tujuan untuk, ke dari untuk warga.
- b. semua komponen aktifitas yang di programkan mesti dibenarkan secara teknikal dan undang-undang.
- c. Aloksi Dana Desa (ADD) diimplementasikan dengan menggunakan prinsip kecekapan, diarahkan dan dikawal.

- d. Model aktiviti yang dijalankan untuk di danai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat transparansi sebagai upaya untuk meningkatkan wahana pelayanan social kemasyarakatan dalam bentuk pemenuhan keperluan primer, pegeratan serta memperkukuhkan institusi kampung dan aktiviti lain yang diperlukankan warga kampung yang ditentukan secara kesepakatan kampung.
- e. . Peruntukan Dana Desa (ADD) mesti dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes / APBG) dan proses penganggaran mengikuti mekanisme yang berlaku.

Untuk melaksanakan ADD secara efektif, pemerintah telah mengeluarkan Permendes No. 4 tahun 2017 yang berisi penentuan keutamaan dalam penggunaan dana desa (Nazilla, 2019)

- a. Fokus penggunaan uang kampung adalah untuk melabur dalam pelaksanaan program dan aktiviti dalam bidang pembangunan desa dan pembangunan kampung.
- b. Fokus penggunaan dana desa adalah untuk berkongsi semua aspek kehidupan masyarakat untuk kebaikan kampung. Atau kemudahan sukan luar bandar dan luar bandar.
- c. Fokus penggunaan dana desa yang disebut dalam sub-bagian (2) (1) harus dipublikasikan atau di tempat umum di mana pemerintah desa dapat memiliki akses langsung ke masyarakat

6. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan perkhidmatan awam di kampung.
- b. Mengatasi kemiskinan.
- c. Memajukan ekonomi kampung.
- d. Mengatasi jurang pembangunan antara kampung.
- e. Memperkukuhkan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

7. Penyaluran Dana Desa

Sebaran dari RKUN ke RKUD:

- a. Fasa 1 tidak tersedia dari 60% hingga Mac dan selepas bulan Julai, dengan syarat berikut:

- 1) Perda APBD
- 2) Perkada yang berkaitan dengan prosedur penyebaran dan penentuan butiran dana desa ke setiap kampung.
- 3) Laporan gabungan mengenai pelaksanaan dan peruntukan Dana Desa TA sebelumnya.

- b. Fasa kedua berada pada tahap rendah 40% pada bulan Ogos

- 1) Laporan Fasa 1 Tabung Luar Bandar telah diedarkan kepada RKD sekurang-kurangnya 90%.
- 2) Laporan fasa pertama dana desa diserap oleh kampung secara purata sekurang-kurangnya 75%.
- 3) Purata produk sekurang-kurangnya 50%.

8. Penggunaan Dana Desa

1. Tujuan dasar menggunakan uang kampung:

- a. Keadilan mengutamakan pengenalan hak dan kepentingan semua penduduk luar bandar.
 - b. Perkara yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan kampung yang lebih mendesak kerana ia lebih memerlukan kerana ia berkaitan langsung dengan kepentingan lebih ramai penduduk kampung.
 - c. Hak pengurusan kampung Mengutamakan hak asal dan hak tempatan mengikut standard kampung.
 - d. Penyertaan merangkumi semua elemen masyarakat dengan mengutamakan inisiatif dan kreativiti masyarakat.
 - e. Tadbir urus diri dan berasaskan sumber desa adalah penggunaan sumber desa yang berkesan, yang mengutamakan tenaga, idea dan kemahiran serta kebijaksanaan penduduk kampung.
 - f. Ciri khas kampung Pertimbangkan dan pertimbangkan ciri khas geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan ekologi kampung, serta keadaan dan realiti perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa:
- A) Penggunaan dana luar bandar untuk jabatan pembangunan desa
 - 1) Prasarana luar bandar:
 - a. Persekitaran tempat tinggal merangkumi perumahan yang sihat, pejalan kaki, pembuangan air dan pembuangan sampah.
 - b. Termasuk penempatan pengangkutan, jalan luar bandar, jambatan luar bandar dan laluan perkapalan.

- c. Termasuk rangkaian penjanaan kuasa, kuasa diesel dan pengedaran kuasa.
- d. Maklumat dan komunikasi merangkumi Internet, telefon awam, dan laman web luar bandar.

2) Infrastruktur Sosial Perkhidmatan Asas:

- a) Kesihatan awam merangkumi air bersih, tandas, posando dan polo.
- b) Pendidikan dan budaya, termasuk perpustakaan desa.

3) Infrastruktur ekonomi dan perdagangan luar bandar:

- a) Skala ekonomi pertanian sebagai upaya keselamatan makanan, termasuk takungan pertanian, pengairan pedesaan, kapal nelayan, dan kandang ternakan.
- b) Perusahaan ekonomi pertanian atau yang lain dapat memusatkan skala pengeluaran mereka pada satu kebijakan desa untuk produk pilihan, yang paling penting termasuk aspek pengeluaran, pengedaran dan penjualan seperti gudang desa, penyimpanan sejuk, pasar luar bandar, dan perumahan pelancong. , Kilang padi dan peralatan bengkel. Kenderaan bermotor.

4) Prasarana persekitaran:

- a) Kesediaan menghadapi bencana alam.
- b) Pengurusan Bencana.
- c) menangani kecemasan lain.
- d) Perlindungan alam sekitar.

5) Kemudahan dan infrastruktur lain.

b) Pemanfaatan Dana Desa untuk Sektor Pemerksaan rakyat kampung

- 1) Mempercepat atau meningkatkan kadar penyertaan masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan desa.
- 2) Pembangunan keupayaan masyarakat luar bandar.
- 3) Untuk mengembangkan daya tahan masyarakat luar bandar.
- 4) Pembangunan sistem maklumat kampung.
- 5) Menyokong atau menyokong pengurusan aktiviti asas perkhidmatan sosial seperti pendidikan, kesihatan, pemberdayaan wanita dan anak-anak, serta hak dan kepentingan anggota masyarakat terpencil dan kampung orang kurang upaya.
- 6) Sokongan kewangan dan penggunaan perusahaan pengeluaran yang dikendalikan oleh BUMDesa dan / atau perusahaan luar bandar yang dimiliki bersama.
- 7) Menyokong pengurusan atau operasi perusahaan ekonomi dan kumpulan masyarakat, koperasi dan institusi ekonomi masyarakat luar bandar yang lain.
- 8) Menyokong pengurusan aktiviti persekitaran.
- 9) Mengeratkan kerjasama antara luar bandar dan luar bandar.
- 10) Kesiediaan Bencana, Pengurusan Bencana dan Pengurusan Kecemasan Lain.

- 11) Kawasan lain dari kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai dengan analisis keperluan Desa dan ketentuan dalam musyawarah Desa..

9. Pengelolaan Dana Desa

Adapun yang menjadi Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa ialah

- 1) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan dan partisipatif yang dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat yang bersangkutan yang memberikan peluang kepada warga agar tau serta memperoleh fasilitas informasi seluasluasnya tentang dana kampung.
- 2) Bertanggungjawab, yaitu mewujudkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Partisipatif, yaitu pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan institusi desa dan komponen masyarakat desa.
- 4) Urutan dan disiplin belanjawan, yaitu pengurusan kewangan desa mesti berdasarkan peraturan atau garis panduan yang menjadi titik permulaan

1) Pengelolaan Keuangan Desa

Balderton dalam Adisas mita berpendapat bahawa istilah pengurusan adalah sama dengan pengurusan, iaitu bergerak, mengatur, dan mengarahkan usaha manusia untuk menggunakan bahan dan kemudahan dengan berkesan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengetahui proses program uang kampung di kampung adalah hal dasar untuk harus mengetahui untuk pihak

berkepentingan di tingkat perkampungan, terutama pegawai kampung untuk menciptakan ketelusan dari pertanggungjawaban kewangan perkampungan dan penyertaan masyarakat. Aturan dari perkampungan , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada tahun 2018 Pasal 1 menyatakan bahwa penentuan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsipnya:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan semua penduduk kampung yang tidak diskriminasi.
 - b. Permintaan pertama dan terutama berkaitan dengan keperluan lebih banyak komuniti luar bandar, dengan mengutamakan kepentingan luar bandar yang lebih mendesak.
 - c. Dengan mengutamakan ketua desa, pemerintah daerah dan pihak berkuasa tempatan dalam standard desa.
 - d. Peserta dengan mengutamakan inisiatif dan kreativiti masyarakat.
 - e. Tadbir urus berasaskan sumber daya dan tadbir urus luar bandar mengutamakan pelaksanaan bebas menggunakan sumber semula jadi desa, mengutamakan tenaga, pemikiran dan kemahiran penduduk luar bandar.
- Dan
- f. Jenis desa, dengan mengambil kira ciri geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan ekologi kawasan luar bandar, serta keadaan dan realiti perubahan atau pembangunan dan kemajuan luar bandar.

Skop pengurusan kewangan desa, dalam hal ini termasuk dana desa, tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan sub-bahagian dari pengurusan keuangan daerah. Menurut Waluyo dalam (Putra & Mashur, 2014), ketika membicarakan pengurusan kewangan desa, ia tidak dapat dipisahkan dari sistem pengurusan kewangan daerah yang merangkumi tiga kitaran utama, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban..



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1) Merancang

- a) Sekdes dirancang oleh Raperdes di APBDesa dan akan dibincangkan antara walikota dan BPD.
- b) APBDesa akan diberitahu kepada Bupati / Walikota melalui kamera sebelum Oktober tahun ini.
- c) APBDesa akan diperiksa oleh Bupati / Walikota selama maksimum 20 hari kerja, dan jika APBDesa menyatakan bahawa responden tidak

mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, Walikota mesti memperbaiki atau memperbaikinya selama 7 hari.

- d) Fokus penggunaan dana luar bandar telah disepakati dalam pertemuan desa antara BPD, Pemdes dan faktor masyarakat..

2) Pelaksanaan

- a) Hasil dan input anggaran dapat dilakukan melalui rekening Tunai Desa atau sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten / kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar
- b) Pemerintah tempatan tidak dibenarkan memungut pungutan selain yang ditetapkan dalam pemerintah daerah.
- c) Bendahari boleh menyimpan wang tersebut di Tunai Desa dan jumlahnya akan ditentukan oleh Gabenor / Walikota.
- d) Perolehan barang dan perkhidmatan di Desa diatur oleh Walikota / Walikota.
- e) Penggunaan kos yang tidak dijangka mesti dibuat dengan perincian RAB dan disetujui oleh Ketua Kampung.

3) pengurusan

- a. Mesti dilaksanakan oleh bendahari luar bandar.
- b. Catat setiap pendapatan dan perbelanjaan.
- c. Tutup buku pada akhir setiap bulan.
- d. Wang itu dikira melalui laporan.

e. Laporan akan dihantar setiap bulan kepada penghulu kampung sebelum 10 bulan depan.

f. Gunakan buku tunai biasa. Buku Tunai Pembantu Cukai dan Buku Bank.

4) Pelaporan dan Pertanggung jawaban

a) Ketua kampung melalui Kamat akan menyerahkan laporan kepada Bupati / Walikota yang terdiri dari laporan pelaksanaan musim pertama dan akhir tahun APDesa.

(b) Laporan pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, perbelanjaan dan pembiayaan yang ditentukan oleh Perdes pada setiap akhir tahun fiskal.

c) Laporan Format Laporan: Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelaksana. APBDesa T.A telah mengendalikan sumber-sumber milik kampung dan program-program pemerintah desa dan tempatan sejak 31 Disember.

10. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Mekanisme untuk memantau dan melaporkan dana desa Kementerian Kewangan memantau dan menilai pengagihan dana desa berdasarkan penyerapan dan hasil produk, mengoptimumkan penggunaan dana dan memantau hasilnya, dan menilai keberkesanan dasar kawalan. Pengagihan perkhidmatan melalui KPPN untuk mendekatkan perkhidmatan ke rantau ini dan memperkukuh serta memperkukuhkan pengurusan dan akauntabiliti dana Des

a) Bupati/Walikota

Tentukan prosedur pengagihan dan pengagihan dana luar bandar ke setiap kampung untuk memastikan hak kewangan kampung tersebut dilaksanakan.

b) Kerajaan Tempatan / BPKAD

Pemindahan dana luar bandar dari RKUD ke RKD untuk memastikan peruntukan dana luar bandar yang tepat pada masanya dan efisien.

c) Pemangku Raja / Mejar

Laporan pelaksanaan perbelanjaan dan laporan penyerapan dana desa menjangkakan kelewatan pengagihan dana desa ke tahap berikutnya.

d) Kerajaan Tempatan / BPKAD

Baki dana desa di RKUD akan menentukan jumlah dana luar bandar yang tidak dikeluarkan dari RKUD hingga RKD pada tahun fiskal sebelumnya.

e) Kerajaan Tempatan / Pusat (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri) / APIP

Kejayaan Pinger dalam belajar menggunakan dana kampung.

Kerjasama dalam pemantauan dan penilaian dana luar bandar

a. Kementerian Dalam Negeri

1) Pembangunan keupayaan pegawai kampung.

2) Melaksanakan pengurusan kampung.

3) Pengurusan, pengurusan, pelaporan dan pertanggungjawaban kewangan kampung.

4) Memperkukuhkan lawatan ke kampung, harta tanah dan pemilikan tanah serta penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat.

5) Penyediaan dokumen perancangan luar bandar.

6. hak asal dan hak tempatan skala luar bandar.
7. Prosedur penyediaan panduan teknikal untuk peraturan desa.

b. Kementerian Kewangan

- 1) Peruntukan dana luar bandar dalam APBN.
- 2) Menentukan perincian peruntukan dana luar bandar dalam peraturan mengenai peruntukan dana kota
- 3) Peruntukan dana kampung dan peruntukan dari RKUN ke RKUD, dari RKUD ke RKD.
- 4) Memantau dan menilai semula penggunaan dana kampung.
- 5) Memenuhi tanggungjawab agensi pengawalseliaan kampung untuk menjaga kestabilan dan kelancaran peralatan dalaman.
- 6) Hukuman tidak mencapai jumlah peruntukan sekurang-kurangnya 10% daripada Dana Luar Bandar (ADD) DAU dan DBH di APBD.
- 7) Melaksanakan pembinaan keupayaan untuk pegawai luar bandar dan pengurus kewangan luar bandar.

c. Kementerian Pembangunan Luar Bandar (Pembangunan Kawasan Rugi dan Pendatang)

- 1) Menetapkan garis panduan dan keutamaan umum untuk penggunaan DanaDesa.
- 2) Beli pembantu kampung.
- 3) Organisasi mesyuarat luar bandar yang mengambil bahagian.
- 4) Penubuhan, pengurusan, rancangan perniagaan, pengurusan, kerjasama dan pembubaran BUMDes.
- 5) Pembangunan luar Bandar

Penyeliaan Modal Luar Bandar

Pemerintah pusat akan mengintegrasikan kementerian dan daerah untuk mengawasi pelaburan luar bandar, dengan penyertaan masyarakat dan penyertaan pengawas daerah hingga KPK.

a. Penduduk kampung

Memantau pelaksanaan pembangunan desa dan pengurusan desa.

b. Ketua daerah

Menjalankan pengawasan desa melalui aktiviti yang mudah.

c. BPD / DPMP

Memantau prestasi datuk bandar.

d. APIP

Pengawasan kewangan desa, penggunaan harta tanah luar bandar dan pengawasan pengurusan desa.

e. J. K. P.

Pemeriksaan keizinan dan pengurusan kewangan awam sesuai dengan prinsip-prinsip pengurusan kewangan awam (pemeriksaan pentadbiran).

f. KPK

Pengurusan dan tanggungjawab kewangan awam atas kesalahan rasuah

Sinergi Pengawasan Dana Desa

a. Kementerian Keuangan

- 1) Pemantauan pegawai desa sebagai cara untuk mengawal pelaksanaan tugas yang sedang dilakukan oleh pegawai desa;
- 2) Penilaian semula anggaran ADD I dalam kes / APBD.
- 3) Kes / Wilayah- Penilaian II peruntukan ADD dalam P / APBD-P.
- 4) Peruntukan dana kampung.
- 5) Memantau dan menilai pengagihan dana luar bandar.

b. KemendesPDTT

- 1) Membangunkan kerangka pendamping untuk meningkatkan kualiti dan kapasiti pegawai desa
- 2) Memantau dan menilai hasil pembantu profesional setiap suku tahun.

c. Kementerian Dalam Negeri

Mendorong Bupati / Walikota:

- 1) Memudahkan penyediaan RKPDesa dan APBDesa.
- 2) Mengoptimumkan peranan OPD wilayah / kota dan daerah dalam bantuan.
- 3) Kebenaran agensi pengawas yang kompeten.
- 4) Meningkatkan ketelusan maklumat di kampung

d. Penyelarasan Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan dan Perhutanan dan Kementerian Dalam Negeri akan diselaraskan dalam pemantauan dan penilaian:

- 1) aturan kepalah daerah / kepalah daerah kabupaten mengenai tata cara pemberian atau kualitas uang kampung ke setiap kampung.
- 2) menjalankan sebaran dari RKUD ke RKD.
- 3) yang tersimpan uang Luar Bandar di RKUD dan RKD.
- 4) Pengurusan dana luar bandar sesuai dengan keutamaan yang diputuskan
- 5) Mencapai hasil pemberian uang luar bandar.

11. Pembangunan Desa

a) Pengertian dan Tujuan Pembangunan

Perkembangan adalah kerja keras untuk meningkatkan kualiti menghidupkan masyarakat, untuk tentang masyarakat tentunya untuk tujuan oembangunan . Metafosis perkembangan adalah proses di berangkat ke kenyataan ke desiderata, iaitu langkah demi langkah, membuat kita untuk perjalanan atau lebih terang, dengan peningkatan kualiti hidup.

Pembangunan didefinisikan sebagai proses dari berbagai dimensi yang dapat melibatkan perubahan besar sehingga menghasilkan kemajuan yang menguntungkan di seluruh masyarakat, ini dapat dilakukan di berbagai sektor mulai dari, hingga institusi republic untuk kecepatan / peningkatan perkembangan ekonomi, tidak bekerja atau pembasmian orang tidak mampu mutlak.

b) Tujuan pembangunan:

- a. Tingkatkan ketersediaan dan luaskan pengagihan keperluan asas rakyat agar kehidupan orang tidak sengsara
- b. mempercepat kebutuhan masyarakat, keberhasilan suatu daerah, untuk menciptakan peluang pekerjaan yang mencukupi, pemeliharaan yang lebih bagus, perhatian yang meningkatkan terhadap penelian budaya dan manusia (dalam aspek kelayakan masyarakat, fizikal dan rohani)
- c. memberikan arahan sosio - prekonomiann individu dan negara, untuk membuat pilihan dari pergantungan Factor-factor Pembangunan

Factor - factor masalah pada perkembangan:

a. Sumber Daya Manusia

Dari masyarakat adalah factor yang paling penting untuk membuat perkembangan, perkembangan yang berulang-ulang bergantung kepada sejauh mana sumber kekuatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mempunyai kecekapan yang mencukupi untuk menjalankan proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Sebilangan besar negara membangun bergantung pada sumber semula jadi dalam menjalankan proses pembangunan. Walau bagaimanapun, sumber semula jadi sahaja tidak menjamin kejayaan proses pembangunan ekonomi jika mereka tidak disokong oleh kemampuan sumber manusia untuk mengurus sumber semula jadi sehingga ada kesatuan yang mencukupi antara sumber semula jadi dan sumber manusia yang ada.

Sumber semula jadi yang dimaksudkan meliputi Kesuburan tanah, sumber mineral, perlombongan, hasil hutan dan sumber laut.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan sains dan teknologi yang pesat menyokong percepatan proses pembangunan, perubahan cara kerja yang pada awalnya digantikan oleh mesin yang kompleks oleh tangan manusia. yang mempunyai implikasi dari aspek kecekapan, kualiti dan kuantiti dari serangkaian aktiviti pembangunan ekonomi dijalankan.

d. Budaya

Faktor budaya mempunyai pengaruh terhadap susunan sosial mereka dalam pembangunan ekonomi, yang dapat berfungsi sebagai penjana atau pemacu proses pembangunan. Budaya yang mendorong pembangunan termasuk kerja keras dan kerja pintar, kejujuran dan ketekunan. Bagi budaya, proses pengembangannya merangkumi anarkisme, mementingkan diri sendiri, kemewahan dan KKN..

e. Sumber Daya Modal

Sumber Sumber modal memerlukan manusia mengurus sumber semula jadi dan meningkatkan kualiti sains dan teknologi. Suumber uang dalam bentuk modal sangat penting untuk perkembangan dan kecepatan perkembangan ekonomii, kerana produk modal juga mempercepat pengeluaran.

12. Sasaran Pembangunan Desa

a. Meningkatkan bekalan dan memperluaskan pengagihan / pengagihan keperluan asas kehidupan seperti perumahan, kesihatan dan alam sekitar.

b. Meningkatkan taraf hidup merangkumi peningkatan dan peningkatan pendapatan dan menyediakan peluang pekerjaan, dan penekanan yang lebih baik pada nilai-nilai budaya pendidikan dan kemanusiaan yang lebih baik. Tetapi harga diri, baik peribadi dan domestik, meningkatkan kesedaran psikologi.

c. Individu dan negara secara keseluruhan akan dibebaskan dari perbudakan dan pergantungan, dan bukan hanya dari hubungan mereka dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber kejahilan dan penderitaan..

demikian mencapai matlamat pembangunan di atas, perlu beralih kepada strategi pembangunan ekonomi:

a. Terus mengembangkan produk sebenar / kecekapan tinggi. Ini kerana akhirnya akan meningkatkan bekalan dengan hasil yang tinggi dan memperluas pendedaran keperluan asas kehidupan, termasuk perumahan, pendidikan dan penjagaan kesihatan.

b. Tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah menunjukkan bahawa ada peluang pekerjaan yang mencukupi.

c. Hapuskan pengangguran dan ketidaksamaan.

Perubahan sosial, sikap mental dan tingkah laku masyarakat dan institusi pemerintah.

13. Pendekatan Pembangunan Desa

a. Pendekatan Legalitas

bermaksud bahwa setiap gerakan pembangunan desa selalu didasarkan dan mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku..

b. Pendekatan Struktural

Secara terstruktur, instansi / staf dan unit melakukan segala perbaikan, mulai dari, pemantauan, evaluasi dan gerakan lanjut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pada tahapan saat ini. Itu masih terhubung dan terintegrasi. Oleh karena itu, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak terjadi di dalam rencana, di wilayah yang bersangkutan, atau di dalam wilayah tersebut.

“Tapi di sini yang kita maksud adalah membuat tanggung jawab dan pertanggungjawabannya berdasarkan tanggung jawab dan fungsinya, dan jelas siapa yang bertanggung jawab mengapa. Dalam semua kegiatan yang direncanakan dan terprogram harus ditentukan tujuan utama pembangunan pedesaan, yaitu pemekaran. pembangunan dan konsekuensinya, setara, meningkatkan kesejahteraan sosial dan membangun masyarakat yang sejahtera, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat yang positif.

Pendekatan percontohan berfokus pada pengalaman dan hasil yang berbeda dari implementasi pembangunan sebelumnya, serta potensi implementasi pembangunan pedesaan, sumber daya manusia dan alam,

dan definisi kebijakan yang diterapkan. Terkait dengan daerah pedesaan..

c. Pendekatan Sosio-Kultural

Dalam hal terminologi terminologi terminologi keriput, terminologi terminologi terminologi terminologi

C. KESEJAHTERAAN

Secara umum, kesejahteraan merujuk kepada keadaan yang baik, keadaan manusia dalam keadaan memenuhi keperluan orang, lebih-lebih lagi keperluan fisiologi yang dipenuhi serta sihat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesihatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualiti hidup masyarakat. Kesejahteraan ini. Ia disedari agar warga ini dapat hidup dengan baik dan dapat mengembangkan diri, sehingga mereka dapat menjalankan peranan sosial mereka dengan baik (Widyastuti, 2012).

Pembangunan ekonomi dikatakan berjaya sekiranya tahap kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kejayaan pembangunan ekonomi tanpa termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan membayangkan jurang dan ketidaksamaan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan susunan sosial yang menunjukkan keadaan corak kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari taraf kehidupan masyarakat, di mana setiap komuniti mempunyai standard tersendiri dalam menentukan perkara apa, apa keperluan mereka dan ukuran kesejahteraan masyarakat dapat diukur sejauh mana keperluan masyarakat dipenuhi (Christia & Ispriyarso, 2019)

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana keperluan asas dipenuhi, seperti rumah yang layak, keperluan pakaian dan makanan yang mencukupi,

kos pendidikan dan kesihatan yang murah dan berkualiti, atau keadaan di mana semua individu dapat memaksimumkan penggunaannya pada tahap tertentu dan dalam keadaan di mana keperluan dipenuhi.terlengkap secara fizikal dan rohani. (Baharim, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari petunjuk, indikator kesejahteraan adalah ukuran untuk menilai keadaan masyarakat yang dikatakan makmur atau tidak. Berikut adalah beberapa.

1. Badan Kebajikan Perancangan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Status kebajikan dapat diukur berdasarkan bahagian perbelanjaan isi rumah. Isi rumah boleh dianggap makmur jika pembahagian perbelanjaan untuk keperluan asas sama atau lebih rendah daripada bahagian perbelanjaan untuk keperluan bukan asas. Sebaliknya, isi rumah dengan perkadaran output yang lebih tinggi untuk keperluan asas daripada rumah tangga untuk keperluan tidak penting dapat dikategorikan sebagai isi rumah dengan status kebajikan yang rendah.
2. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), menurut BPS ada 8 indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan, yaitu pendapatan, penggunaan atau perbelanjaan keluarga, keadaan perumahan, kemudahan perumahan, kesihatan anggota keluarga, fasilitas kesihatan, fasilitas pendidikan dan kemudahan pengangkutan..

Dari beberapa definisi kesejahteraan di atas, dapat disimpulkan bahawa petunjuk kesejahteraan adalah:.

D. KETERKAITAN ANTARA PENDISTRIBUSIAN DANA DESA DENGAN KESEJAHTERAAN

Dana desa merupakan penyaluran sumber daya dari pemerintah pusat melalui desa. Dalam penggunaan dana tersebut termasuk prioritas untuk mensejahterakan masyarakat. Dana pedesaan diperoleh dari anggaran nasional yang dialokasikan ke kota

yang ditransfer melalui anggaran dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan, pengembangan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jika ADD dapat digunakan secara intensif dan efektif, ADD dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian ADD merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonomi sekaligus tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya desa, berdasarkan partisipasi masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatnya peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga mampu mengembangkan daerah tertinggal dalam satu kawasan.

Berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan, di kampung Paku, Kabupaten Binua, Kabupaten Polman, penyelidik ingin menganalisis masalah yang berkaitan dengan pengalihan anggaran awam sebagai usaha pemerintah untuk memenuhi keperluan standard masyarakat yang akan diadarkan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku, Kabupaten Binua, Kabupaten Polman.

E. IMPELEMENTASI KEBIJAKAN

Konsep Pelaksanaan: Pada prinsipnya, pelaksanaan dasar adalah cara bagi sesuatu polisi mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk melaksanakan dasar awam, ada dua pilihan, yaitu menerapkannya secara langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan derivatif atau terbitan dasar awam. Rangkaian pelaksanaan dasar dapat diperhatikan dengan jelas, mulai dari program, hingga proyek dan kegiatan. Model ini menyesuaikan mekanisme biasa dalam pengurusan, terutamanya pengurusan sektor awam. Polisi diturunkan dalam bentuk program program yang kemudian diturunkan menjadi projek, dan akhirnya dalam bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146-147) mengartikan kinerja publik dasar untuk maju dalam tindakan yang dulu. Tindakan tersebut meliputi transformasi keputusan menjadi tindakan operasi dalam kerangka waktu tertentu, atau kelanjutan upaya mencapai tujuan perkembangan untuk lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana ditentukan oleh keputusan kebijakan yang diambil oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) tentang kinerja sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Pelaksanaannya untuk lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi setelah kegiatan yang lebih efektif untuk memahami adalah focus melihat terhadap pelaksanaan kebijakan, untuk peristiwa atau kegiatan yang terlihat setelah penerapan garis panduan untuk kebijakan Negara yang meliputi kedua-dua usaha untuk melaksanakannya dan menyebabkan akibat / dampak . terlihat untuk warga tetantang peristiwa ”.

Terlihat untaian kata di up bisa di ambil garis besarnya bahwa pelaksanaan dasar bermula sehingga bertujuan menetapkan /dikenal pasti yang memutuskan dasar. Untuk pelaksanaannya adalah untuk melibatkan seseorang untuk melihat hasil yang telah di lakukan untuk mencapai tujuan dasar tersebut..

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa pelaksanaan dasar dipengaruhi oleh empat pemboleh ubah, yaitu:

1. Penyaluran informasi, yakni pencapaian pelaksanaan Dasar masyarakat sehingga pelaksana tahu apa yang harus dilakukan, di mana tujuan dan objektif dasar harus disebarkan ke kelompok sasaran (kelompok sasaran), sehingga akan mengurangi penyimpangan pelaksanaan..

2. Sumber, walaupun isi dasar sudah diutarakan dengan pasti and komitmen, sekiranya pelaksana kekurangan sumber untuk melaksanakannya, pelaksanaannya berjalan efisien. Sumber-sumber ini boleh berupa sumber masyarakat, contohnya, kecekapan eksekutif dan sumber kewangan.
3. Pembuangan adalah watak dan ciri yang dimiliki pelaksana, Seperti janji, kejujuran, sifat demokratik. Sekiranya pelaksana mempunyai kecenderungan Baiklah, maka pelaksana dapat melaksanakan polisi tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila pelaksana mempunyai prilaku /pemikiran berbeza dari buatan dasar, yang lagi berjalan pelaksanaan dasar akan berkesan.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertanggung jawab yang melaksanakan kebijakan, yang melaksanakan kebijakan. Aspek struktur organisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan gangguan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan memperlemah pengawasan dan menimbulkan konsekuensi, yaitu prosedur birokrasi yang kompleks dan kompleks sehingga tidak menjadikan kegiatan organisasi lebih gampang. Rumit untuk mempermudah aktivitas organisasi.

Menurut Edward (Buddy Vinarno, 2008: 181), sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai dan keterampilan yang baik dalam menjalankan tugasnya, serta hak dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menerjemahkan proposal ke dalam makalah untuk melaksanakan pekerjaan umum.

Menurut Edward, struktur birokrasi (Budi Vinarno, 2008: 203) memiliki dua ciri utama yaitu prosedur operasi standar (SOP) dan breakdown..:

“Tahapan dasar prosedur SOP atau perintah kerja dikembangkan berdasarkan keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana serta keinginan untuk bersatu dalam bisnis organisasi yang kompleks dan luas. Sementara itu, fragmentasi datang dari luar birokrasi, seperti DPR, kelompok kepentingan eksekutif, sifat fundamental dari konstitusi negara dan birokrasi pemerintahan. ’

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011: 94) terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu karakteristik masalah (fleksibilitas masalah), karakteristik kebijakan / hukum (kapasitas hukum struktur implementasi), dan perubahan lingkungan (pengaruh kuat).). Variabel yang mempengaruhi kinerja).

3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horne (Subarsono, 2011: 99) ada lima perubahan yang mempengaruhi efisiensi implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, penguatan komunikasi dan kegiatan antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan sosial, ekonomi, dan politik. kondisi..

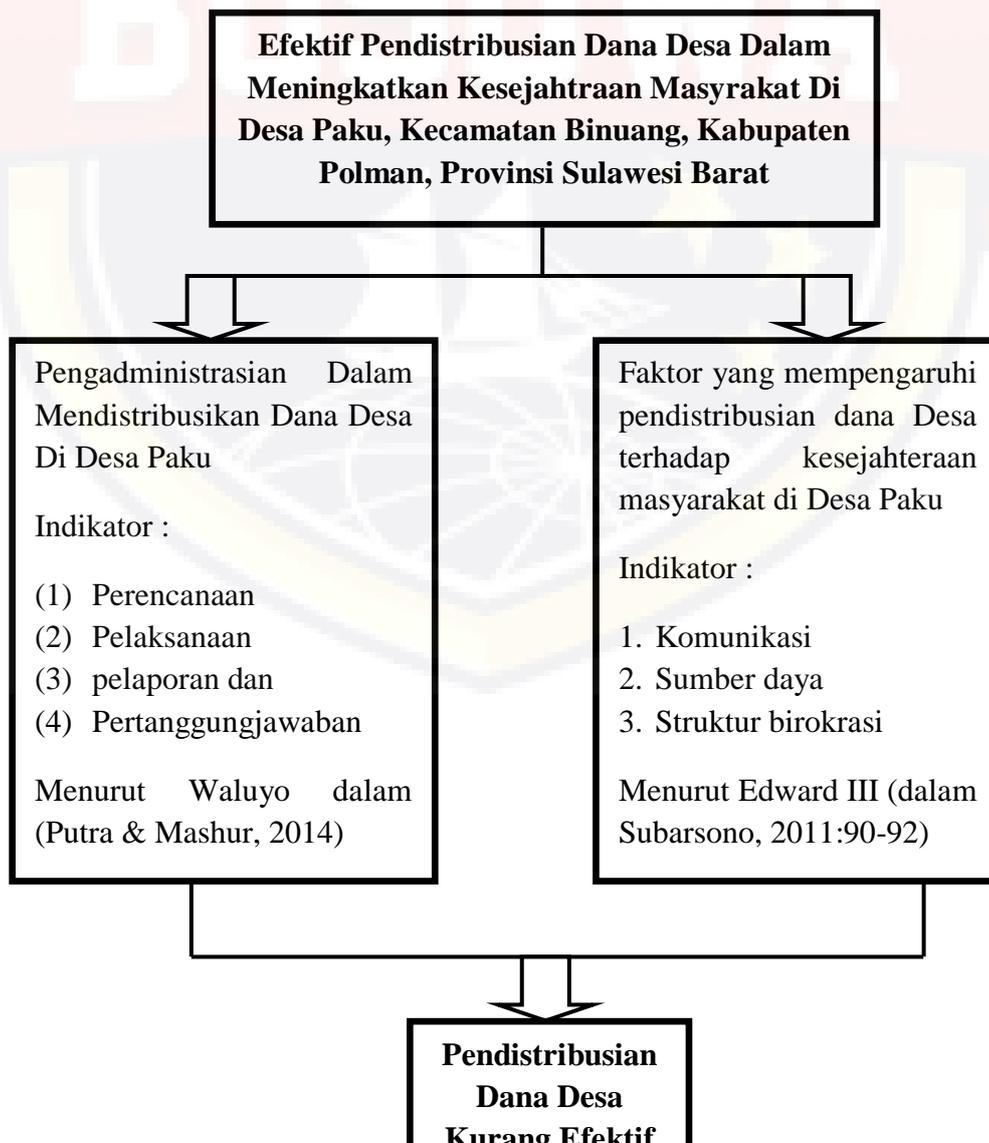
Menurut Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177), proses komunikasi politik dipengaruhi oleh tiga hal penting, yaitu:

- a) Pengiriman adalah faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi dasar. Sebelum sebuah kantor dapat melaksanakan keputusan, harus diketahui bahwa keputusan telah dibuat dan bahwa perintah telah dikeluarkan untuk menegakkannya.
- b) Faktor kedua adalah akurasi. Jika dasar-dasarnya terpenuhi, maka instruksi pelaksanaan tidak hanya diterima oleh aparat kepolisian, tetapi komunikasi kebijakan juga harus jelas. Instruksi kepada pelaksana tidak selalu jelas, dan tidak menentukan kapan dan bagaimana program akan diimplementasikan.
- c) Mematuhi faktor ketiga, jika implementasi kebijakan efektif, maka prosedur implementasi harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang diberikan kepada pemegang polis sudah jelas, namun jika perintahnya berlawanan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan pemegang polis untuk menjalankan tugasnya dengan baik...

F. Kerangka Konsep

Desa Paku adalah salah satu kampung di Kabupaten Binuang, Kabupaten Polman. Setiap kampung disahkan menerima geran dari pemerintah yang disebut Dana Desa. Adapun mengukur pentadbiran dalam mengagihkan dana desa di Desa Paku menggunakan petunjuk menurut Waluyo dalam (Putra & Mashur, 2014), ketika berbicara mengenai pengurusan kewangan desa tidak dapat dipisahkan dari sistem pengurusan kewangan daerah yang merangkumi

Ada tiga siklus utama, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan, dan 4) akuntabilitas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Paku di bawah pemerintahan Edward III (2011 dalam Subarsono: 2011: 90-92) adalah 1) komunikasi, 2) sumber daya, dan 3) birokrasi struktural. Berdasarkan uraian di atas, maka rencana kerangka kerja konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar. 2. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif kerana dijalankan dalam keadaan semula jadi. Sugiyono, (2014) menyatakan bahawa kaedah penyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan yang digunakan untuk memeriksa keadaan objek semula jadi, di mana penyelidik adalah instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif , dan hasil penyelidikan Kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi.

Objek semula jadi yang disebut oleh Sugiyono (2014) adalah objek yang ada, tidak dimanipulasi oleh penyelidik sehingga keadaan ketika penyelidik memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah meninggalkan objek tersebut relatif tidak berubah. Oleh itu, semasa membuat penyelidikan mengenai makna hidup bagi orang kurang upaya yang menjadi usahawan, para penyelidik tidak mengatur keadaan di mana penyelidikan itu dilakukan dan mereka juga tidak memanipulasi pemboleh ubah.

Kaedah kualitatif menurut Creswell (1998) adalah proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyiasat gejala sosial dan masalah manusia. Penyelidik membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan kajian mengenai situasi semula jadi (Pasolong, 2012). Bogdan dan Taylor (dalam Maleong, 2007) menyatakan bahawa kaedah kualitatif adalah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2007).

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Dalam penelitian ini sebagai upaya penyempurnaan skripsi peneliti akan melaksanakan penelitian di Kantor Desa Paku. Kecamatan Binua Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai Januari 2021.

C. Informan Penelitian

Untuk melengkapi data dari responden maka peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai yaitu:

1. Kepala Desa Paku
2. Kepala Dusun di Desa Paku, yang berjumlah 4 Dusun
3. Serta masyarakat yang dianggap mampu memberikan berupa informasi yang rasional, yaitu 7 orang total dari semua dusun
4. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, atau foto, hasil rapat, cindra mata, jurnal data berupa dokumen seperti ini bisa di pakai untuk menggali informasi tentang kejadian di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan untuk memaknai semua dokumen tersebut (Faisal, 1990:77)

D. Deskripsi Fokus

Fokus penyelidikan adalah fokus penumpuan pada objektif penyelidikan yang sedang dijalankan, fokus penyelidikan digunakan sebagai dasar untuk pengumpulan data sehingga tidak ada bias terhadap data yang

diambil. Untuk menyamakan pemahaman dengan perspektif kajian ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai objektif dan fokus kajian ini.

Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, variabel yang dapat digunakan untuk mengukur dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentadbiran dalam mengagihkan dana kampung di Desa Paku

Pentadbiran dalam mengagihkan dana desa tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen keuangan daerah yang mencakup tiga siklus utama, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembahagian dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Paku Village

2. Sumber-sumber penting seperti kakitangan yang mencukupi dan kemahiran yang baik untuk menjalankan tugas mereka, wewenang dan kemudahan yang diperlukan untuk menterjemahkan cadangan di atas kertas untuk melaksanakan perkhidmatan awam merangkumi 1) Komunikasi, 2) Sumber dan 3) Struktur birokrasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyelidikan yang dapat berupa data, fakta, gejala, dan informasi yang valid (sebenarnya), dapat dipercaya (dapat dipercaya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Ini dijelaskan oleh Sugiyono (2007) bahawa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil pemerhatian, wawancara, dokumentasi, dan kombinasi atau triangulasi.

Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan teknik pengumpulan data dengan kaedah pemerhatian, wawancara, kajian literatur, pencarian data dalam talian, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pemerhatian didefinisikan sebagai rakaman sistematik gejala yang muncul pada objek penyelidikan. Pemerhatian terbahagi kepada dua, iaitu pemerhatian langsung dan pemerhatian tidak langsung.

Pemerhatian langsung adalah pemerhatian dan rakaman objek di mana peristiwa itu berlaku atau sedang berlaku, sehingga pemerhati berada bersama objek yang disiasat. Sementara itu, pemerhatian tidak langsung adalah pemerhatian yang dibuat bukan ketika sesuatu sedang disiasat (Maman Rahman, 1999).

Menurut Kusuma (1987) pemerhatian adalah pemerhatian yang dibuat secara sengaja dan sistematik terhadap aktiviti individu atau objek lain yang disiasat. Jenis pemerhatian merangkumi pemerhatian berstruktur, pemerhatian tidak berstruktur, pemerhatian peserta, dan pemerhatian bukan peserta. Dalam kajian ini, mengikut objek kajian, pengkaji memilih pemerhatian peserta. Pemerhatian peserta adalah teknik pemerhatian di mana penyelidik mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan ke atas objek yang disiasat.

2. Wawancara

Menurut Sulisty Basuki (2006) bahawa temu bual terbahagi kepada tiga kumpulan, iaitu temu bual berstruktur, wawancara separa berstruktur, dan wawancara mendalam. Dalam kajian ini, penyelidik memilih

wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mengumpulkan maklumat yang kompleks, yang kebanyakannya mengandungi pendapat, sikap dan pengalaman peribadi.

Dalam teknik temu ramah mendalam penyelidik melakukan perbualan dengan tujuan tertentu. Perbualan ini dilakukan oleh dua pihak, iaitu penemuduga (yang menanyakan soalan) dan penemubual (yang memberikan jawapan kepada soalan tersebut).

Wawancara mendalam bertujuan untuk meninjau pendapat informan secara mendalam mengenai tradisi perkahwinan tradisional Mamasa dan usaha memperkukuhkan kedudukannya. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan melihat kembali kebenaran data dengan model pemerhatian untuk tujuan pengesahan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi yang akan digunakan oleh penyelidik di sini adalah dalam bentuk foto, video, rakaman dan semua data mengenai tradisi perkahwinan tradisional Mamasa dan usaha atau konsep pengukuhan dalam kehidupan sosial. Teknik ini bertujuan untuk melengkapkan teknik pemerhatian dan temu bual.

F. Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap gejala sosial yang berlaku. Menurut Maykut dan Morehouse (1994), tujuan penyelidikan kualitatif adalah untuk mencari corak yang muncul setelah pemerhatian yang dekat, dokumentasi yang teliti dan analisis yang teliti. Hasil yang diharapkan

dari kajian ini bukanlah generalisasi hasil, tetapi pemahaman mendalam tentang objek kajian berdasarkan pemerhatian dan perspektif pemberi maklumat (Pasolong, 2012)..

Sementara itu, menurut Moleong (2007) penyelidikan kualitatif adalah penyelidikan yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek kajian, misalnya, tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara penerangan dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks semula jadi yang spesifik dan dengan menggunakan pelbagai kaedah semula jadi (Maleong, 2007).

Penyelidikan yang akan dilakukan oleh penyelidik dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada pandangan Koentjaraningrat (1993) bahawa kaedah deskriptif kualitatif adalah penyelidikan yang memberikan penerangan yang tepat mengenai individu atau kumpulan tertentu mengenai keadaan dan gejala yang berlaku (Maleong, 2007)..

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari kajian lapangan, iaitu pemerhatian langsung terhadap objek yang akan dikaji melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk soal selidik dan pemerhatian. Menurut Arikanto (2010), data primer adalah data dalam bentuk kata-kata, gerak-gerik atau tingkah laku lisan atau lisan yang dilakukan oleh subjek yang boleh dipercayai, iaitu subjek kajian atau informan berkenaan dengan pemboleh ubah yang

dikaji atau data yang diperoleh. Dari responden secara langsung (Arikunto, 2010).

Sumber data primer terdiri dari:

- a) Kepala Desa Paku
- b) Menggali informasi di setiap Kepala Dusun di Desa Paku, yang berjumlah 4 Dusun
- c) Serta masyarakat yang dianggap mampu memberikan berupa informasi yang rasional, yaitu 6 orang dari setiap kecamatan yang terpencil.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari kajian literatur dengan mengkaji literatur dan sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan masalah dan topik yang sedang diteliti. Menurut Arikunto (2010), data sekunder dalam sebuah kajian diperoleh dari pemerhatian yang dibuat oleh pengarang dan dari kajian literatur. Data sekunder boleh datang dari dokumen grafik seperti jadual, nota, sembang, foto dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari :

- a. Peraturan Perundang-Undangan
- b. Buku
- c. Penelusuran Data Online
- d. Jurnal Ilmiah
- e. Dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Metode mencari kajian ini melihat secara teliti sesuai cara kajian ilmiah berdasarkan konsep analisis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Tetapi Bognan dan Becklen di Molong juga mengatakan bahwa analisis informasi penting (2007) adalah upaya untuk bekerja dengan data, mengumpulkan data, mengumpulkan di tempat-tempat yang dapat dikontrol, disusun, mencari dan menganalisis, untuk mengidentifikasi apa yang penting. dan apa yang harus dipelajari Dan putuskan apa yang akan Anda ceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dipilih dengan menggunakan teknologi informasi deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dan dikumpulkan, primer dan sekunder, kemudian diterima sebagai solusi atas masalah penelitian di akhir. Berdasarkan informasi di atas, langkah pertama dalam pengumpulan data rinci dari data saat ini dapat diselesaikan, untuk mengatur klasifikasi, dan kemudian mempresentasikan hasil penelitian kepada orang lain..

Selanjutnya, teknik analisis data yang dicadangkan oleh Miles dan Hubermen dalam Jaman Satori dan Aan Komariah (2010) dapat diaplikasikan melalui tiga baris aplikasi seperti berikut:

1. Reduksi Data

Pengurangan data adalah proses memilih, menumpukan perhatian, memerhatikan dan mempermudah, mengabstrak dan mengubah data kasar yang diperoleh dari nota lapangan. Dengan mengurangi, meringkaskan, mengekod, meneroka tema, memberikan kelompok dan menulis memo.

Selanjutnya, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007) mengatakan bahawa pengurangan data bermaksud meringkaskan, memilih perkara utama, memberi tumpuan kepada perkara penting, mencari tema dan corak dan membuang yang tidak perlu.

Pengurangan data yang akan dilakukan dalam kajian ini akan dilakukan secara selektif baik untuk informan maupun data yang disampaikan oleh informan yang bersangkutan. Sekiranya soalan yang dikemukakan oleh penyelidik dan telah mendapat jawapan yang sama dari dua informan, jawapannya dianggap sah sehingga kebenarannya dapat dibenarkan. Sehingga dengan kaedah ini dalam proses pengurangan data penulis akan dapat membantu bahawa tidak perlu mengemukakan pertanyaan yang sama kepada semua informan.

2. Penyajian Data

Penyampaian data adalah proses mencurahkan data dalam bentuk naratif, matriks, grafik, rangkaian dan carta dengan menggabungkan maklumat dari hasil yang dijumpai semasa proses penyelidikan sehingga mudah dianalisis atau difahami. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007) bahawa yang paling sering digunakan untuk menyampaikan data dalam penyelidikan kualitatif adalah teks naratif.

Jadi dalam satu kajian, data yang dikumpulkan seperti data dalam bentuk soal selidik, jadual dan grafik kemudian akan diceritakan oleh pengkaji dalam bentuk deskriptif sehingga akan lebih mudah untuk dianalisis. Lebih-lebih lagi, dalam kajian ini, banyak istilah bahasa daerah

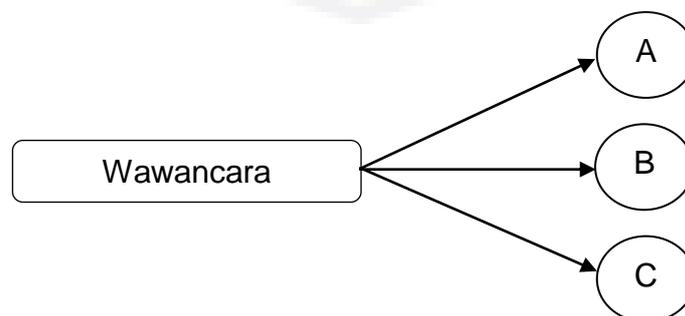
Mamasa perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat difahami oleh masyarakat umum.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Membuat kesimpulan adalah aktiviti mencari makna, mencatat keteraturan, corak, penjelasan, konfigurasi yang mungkin sesuai dengan aliran penyebab penyelidikan ini. Kesimpulan juga disahkan, iaitu memikirkan semula yang terlintas di fikiran penganalisis semasa membuat kesimpulan, mengkaji semula catatan lapangan atau meminta jawapan atau komen daripada responden yang telah mengumpulkan data untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh penyelidik, untuk mendapatkan ketahanan data dan keserasiannya di lapangan..

H. Teknik Keabsahan Data

Pengujian kesahan data dilakukan untuk menilai sama ada data yang diperoleh di lapangan adalah sah atau tidak. Menguji kesahan data dalam kajian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik memeriksa kesahan data yang menggunakan sesuatu selain daripada data untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai perbandingan untuk data tersebut. Teknik triangulasi dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan satu kaedah mengumpulkan data dari beberapa sumber data (beberapa sumber) yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (Multiple Sources) Sumber:
Yusuf (2014)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa paku adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan binuang Kabupaten polewali mandar Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk pada Tahun 1959 yang dulunya merupakan perkampungan yang dipimpin oleh tokoh adat yang di gelar sebagai puang matoa perkampungan tersbut di beri nama kampung ALLA. Di namakan sebagai kampung alla karna alasan bahwa area tersebut berada di tengah-tengah perkampungan lainnya. Kemudian antara beberapa kampung sering terjadi komplik masyarakat. antara masyarakat kampung alla (desa paku) dengan kampung dusung (pajalele) terkait dengan tapal batas wilayah antara kerajaan sawitto, dengankerajaan binuang, tidak lama kemudian muncullah raja bone yaitu Arung palakka memanggil raja sawitto dan raja binuang dan diberikan penjelasan serta pemahaman tenatan batas wilayah dan kemudian di berikan patok (tapal batas), awal mualanya Kampung ALLA berubah menjadi desa paku dengan alasan tapal batas kedua wilayah telah ditetapkan di kampung tersebut, sebagai wilayah perbatasan kabupaten pinrang dan kabupaten polewali , kemudian kampung dusung pun berubah nama menjadi pajalele. Adapun dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Desa Paku

2. Kondisi Desa Paku

a. Geografis

Desa Paku terletak +/-47 Km dari Ibukota Kabupaten Polman, atau +/-15 Km dari Kecamatan Binuang dengan luas wilayah $\pm 9,23 \text{ Km}^2$, Peta Admistrasi Wilayah Desa paku dapat dilihat pada lampiran batas-batas Desa paku sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Amola
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kabupaten Pinrang
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Teluk Mandar
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Miring

b. Iklim

Kondisi desa Paku meliputi musim hujan, musim kemarau dan pergantian musim. Musim hujan biasanya berlangsung dari Desember hingga Januari, dan musim kemarau dari April hingga September, dan periode peralihan dari November hingga Desember.

c. Tingkat Pendidikan

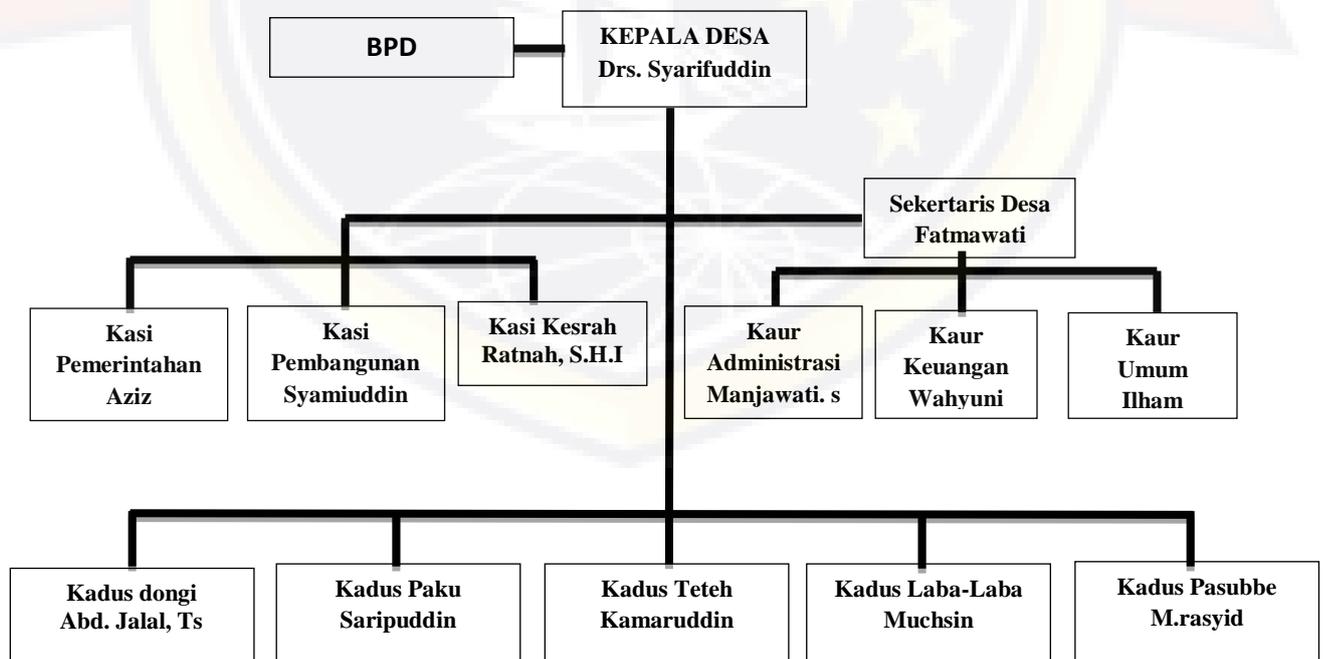
Jumlah penduduk Desa Paku adalah 4310 jiwa. Bersamaan dengan itu, status sekolah komunitas di desa Paku dibagi di bawah ini. Status sekolah terbagi menjadi SD, SMP, SMA dan pascasarjana, ada yang tidak bersekolah. Jumlah siswa di sekolah menengah adalah 205, SMP 80, SMA 150, dan tingkat pelancong 60. Masyarakat Paku selebihnya tidak bersekolah.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Paku sebagian besar adalah petani, mencapai 500 orang, 150 perempuan membantu perekonomian keluarga dan 15 pengusaha. Di sisi lain, Desa Paku memiliki 80 pegawai negeri dan 200 pegawai. Sisa orang yang tidak terdaftar tidak bernyawa.

3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.



Gambar 5. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengurus desa dan mewakili kewenangan desa dan memiliki harta bersama.

Dalam hal ini tokoh masyarakat berhak: BPD Dr. Asdar H. Muh, Ketua Leborg Hamel. Sekretaris Desa Edi Aslidayanti, SP H. A. Sampewali Kepala KAUR Ramayana Malo, Ketua S. Sos Labempa Karaka KAUR Dusun Junaeda Atinae, A.Ma.Pd KAUR Jenderal Bingga Ketua Dusun Anukaraja Mappangile

- a) Menetapkan kebijakan terkait penerapan APB Desa
- b) Identifikasi Investor Komunikasi Lokal (PTPKD)
- c) penunjukan pemungut pendapatan di daerah pedesaan;
- d) Menyetujui pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang ditentukan dalam APB Desa;
- e) Mengambil tindakan untuk meningkatkan pengeluaran masyarakat.

Ketua Desa memegang jawatan selama 6 (enam) tahun dari tarikh perasmian dan boleh berkhidmat selama maksimum 3 (tiga) penggal berturut-turut atau tidak. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengurusan Kewangan Desa, Ketua Desa memberikan sebagian kekuasaannya kepada Alat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa yang merupakan Koordinator PTPKD membantu kepala d esa dalam mengelola keuangan desa, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebuah. Mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Manajemen APB Desa
- b. Peraturan Desa Terkait APB Lokal, Tanggung Jawab Pengeditan Desa Luar Ruang dan Penggunaan APB Lokal
- c. Memantau pelaksanaan 73 kegiatan di anggaran pedesaan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB Desa
- e. Bukti penerimaan dan pengeluaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAB), APB Perdesaan (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi

Kepala bagian merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi dasar di bidangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, desa terdiri paling banyak 3 (tiga) kelompok. Kepala departemen bertanggung jawab untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan RAB yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Latihan kegiatan dan / atau komite komunitas.
- c. Desa-desa di pedesaan APB

- d. Sebuah Buat rencana tindakan yang dapat menghasilkan tindakan tindakan yang objektif
- e. Kontrol modelnya dengan masuk ke acara tabungan
- f. saya. Laporkan kejadian tersebut kepada walikota. Kirimkan SPP dan isi bukti biaya acara.

d. Bendahara Desa

Bendahara Desa PTPKD merupakan salah satu aset utama yang dipegang oleh Chief Financial Officer dan mempunyai tugas membantu Sekretaris di halaman belakang. Bendahara desa mengelola keuangan, termasuk perolehan atau pembiayaan pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari anggaran pembiayaan.

- a. Manajemen dikelola melalui rekening bank biasa, kantor pajak dan rekening bank. Pengendalian administratif meliputi:
- b. Pendapatan, tabungan, tabungan / pembayaran Buat catatan kredit dengan setiap tanda terima dan tutup buku secara berurutan di akhir setiap bulan.
- c. Merencanakan uang melalui akuntabilitas.

4. Visi Dan Misi Desa Paku

a. Visi Desa Paku

Terwujudnya desa paku sebagai desa yang lebih unggul dari desa lain dalam usaha perkebunan, pertanian , hasil hutan, peternakan dan dari segi pendidikan .

b. Misi Desa Paku

- a) Perbaiki akses ke sentra-sentra perkebunan dan bangunan sarana dan prasarana pendukungnya.
- b) Peningkatan sumber daya manusia
- c) Penguatan kelembagaan

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil peneliti dan terwujudnya tujuan dari penelitian ini, setelah menilai tiga indikator untuk mengukur efektivitas pendistribusian dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya peneliti menghubungkan ke tiga indikator tersebut dengan tujuan untuk menjawab faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pendistribusian dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku dan hambatan dalam bantuan dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paku. Dengan demikian untuk menjawab tujuan yang tercapai maka dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

1. Pengadministrasian Dalam Mendistribusikan Dana Desa Di Desa Paku

Efektivitas pendistribusian dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di desa paku. Untuk mengukur pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di desa paku dilihat dari indikator. Adapun indikator menurut Waluyo yaitu 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pelaporan dan 4) pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Dalam kerangka "Desa Pembangunan", ia harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik juga, kerana perencanaan program itu adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan desa yang efektif. Proses perancangan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program yang baik dan seterusnya akan mendorong penyertaan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Perancangan program bertolak dari aspirasi, keperluan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil temu bual pengkaji dengan salah seorang informan, Said Nur (48 tahun), sebagai ketua Desa Paku, dia menyatakan:

“kami disini mengadakan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) selalu kami hadirkan kepala-kepala dusun untuk menyatukan program, kerana dusun juga memiliki program masing masing”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang hadir dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) yaitu struktur desa dan kepala-kepala dusun, kerana masing-masing dusun memiliki program di dusunnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Kamaruddin (43 tahun) selaku kepala dusun tete, beliau menyatakan:

“sebelum Musrenbangdes dilaksanakan di desa, kami disini mengadakan Musdus, yang hadir dalam Musrenbangdes hanya perwakilan dari masyarakat dusun saja”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara dari kepala dusun menunjukkan bahwa ditingkat dusun mengadakan musyawarah dusun (MUSDUS) sebelum diadakan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) yang diadakan oleh pengurus desa, yang hadir dalam musyawarah dusun (MUSDUS) hanya

beberapa masyarakat saja sebagai perwakilan dalam musyawarah dusun (Musdus). Hal yang sama pula dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Ahmad Haruddin (50 tahun) selaku kepala dusun pasubbe, beliau mengatakan:

Kami disini mengadakan musdus sebelum Musrenbangdes, beberapa masyarakat yang hadir di musdus sebagai perwakilan saja untuk meminta pendapat, nanti di Musrenbangdes baru semua dusun serahkan program dusun masing masing”. (wawancara tanggal 29 desember 2020).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perwakilan dari masyarakat dusun yang hadir dalam musdus bukan keseluruhan masyarakat. Hal sama pula yang dilakukan oleh dusun laba laba, dari hasil wawancara dengan salah satu Idris (52 tahun) selaku kepala dusun laba laba, beliau menyatakan:

“kami melaksanakan musdus disini hanya beberapa masyarakat saja sebagai perwakilan dalam musdus, bukan seluruh masyarakat dusun”. (wawancara tanggal 29 desember 2020)

Berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa perwakilan beberapa masyarakat dusun laba laba saja yang hadir dalam musdus.

Dari hasil wawancara dan fenomena yang diperhatikan oleh penyelidik, dikatakan bahawa perancangan pengurusan kewangan desa merangkumi dana desa di Desa Paku, yang sebenarnya, melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Paku, adalah kurangnya penyertaan masyarakat dalam aktiviti meneroka idea dan aspirasi. Perbincangan yang diadakan hanya dihadiri oleh pegawai desa dan dusun dan orang-orang tertentu yang menerima jemputan untuk pertemuan itu, sementara bagi masyarakat umum tidak ada undangan terbuka. Ketiadaan jemputan terbuka menyebabkan

masyarakat umum cenderung untuk tidak mengetahui aktivitas apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kampung pada tahun akan datang.

Ketiadaan peluang untuk masyarakat umum menghadiri Musrenbangdes secara langsung tanpa jemputan menyebabkan masyarakat tidak tahu aktivitas apa yang akan dilakukan di kampung tersebut dan masyarakat juga tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka tentang apa yang mereka perlukan melalui musyawarah ini. Ini memberi implikasi kepada pemikiran masyarakat yang hanya mengetahui bahwa kampung mendapat pengeluaran dana, sedangkan sumber wang dan penggunaan wang, orang cenderung tidak mengetahuinya. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa dalam mengupayakan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa, melalui sosialisasi maupun mengundang masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu transparan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah menggunakan rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pelaksanaan program penggunaan dana desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian kegiatan terkait perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.

Berdasar hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Said Nur (48 tahun), selaku kepala Desa Paku, beliau menyatakan:

“sebelum pelaksanaan program, kami disini menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa menyusun RPJMDes dan RKPDes harus sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah. Dan beliau menyatakan bahwa

“sebelum menyusun RKP Desa kami pastikan standar harga barang, untuk kami cantumkan dalam RKP Desa”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana desa diawali dengan penyusunan RKP Desa, namun sebelum menyusun RKP Desa perlu di pastikan kembali tersedianya data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Dan juga beliau menyatakan:

“biasanya dana desa masuk di rekening desa terlambat masuk, sehingga kegiatan yang kami rencanakan tidak sesuai dengan target, itu yang membuat kami terlambat”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa pencairan dana desa yang dilakukan belum sesuai dengan dengan peraturan mengenai kalender pengelolaan keuangan desa. Hal ini berdampak pada sering bergeser atau terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Hal lainnya adalah belum adanya kesesuaian antara target, rencana dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dana desa di Desa Paku. Hal ini terlihat dari tidak sesuainya dokumen perencanaan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini adalah prioritas program dan kegiatan

dokumen RPJMDes yang tidak memuat tentang program di bidang pemberdayaan.

Kesesuaian antara target dan pencapaian program dalam akuntabilitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. penciptaan akuntabilitas selain ditentukan oleh hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan, juga sangat ditentukan oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Data yang diperoleh di lapangan juga menunjukkan bahwa dana desa yang ada di Desa Paku lebih diprioritaskan penggunaannya di bidang pembangunan. Pada tahun 2019 dari total dana desa yang diterima oleh Desa Paku sebesar Rp 25.168.124.000, dengan rincian untuk digunakan pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 19.200.500.000 dan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat sebesar Rp 164.500.000, sedangkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 5.138.900.000.

3) Pelaporan

Selain itu, laporan pelaporan merupakan tahapan dimana walikota menyampaikan laporan kepada direktur / walikota atas pelaksanaan APBDes dalam bentuk laporan triwulan pertama dan laporan akhir tahun.

Ada dua laporan berupa laporan kegiatan di balik layar APBDesa. Selama triwulan pertama, laporan pelaksanaan belanja di perdesaan, termasuk pelaksanaan laporan bank dari perdesaan setiap enam (enam) kali dan pelaksanaan belanja perdesaan di luar. Kedua, laporan tahunan, yaitu laporan kinerja cash back dalam 1 (satu) tahun buku.

Penyerahan triwulanan dan laporan tahunan Matai desa melaporkan bahwa camat adalah sub-bagian dari kabupaten, dan camat melaporkan semua laporan yang disampaikan oleh kepala desa. Di daerah yang dilaporkan ke Bupati melalui SKPD yang membawahi pemerintah daerah, laporan tersebut dikabarkan menjadi dasar penyaluran dana kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Polewali Mandar.

Saat menyampaikan laporan penggunaan dana masyarakat, kepala desa yang sesuai harus menyampaikan laporan tersebut tepat waktu. Dalam hal laporan tidak disampaikan tepat waktu atau sesuai jadwal, Bupati berhak menunda penyerahan kembali sebagian dana ke jenjang berikutnya dan mengurangi pendanaan dari APBD ke tahun depan, menurut sebuah kajian. oleh Divisi Manajemen dan Riset Regional. Penyederhanaan daerah dilakukan atas kebijaksanaan gubernur.

Menggunakan Peraturan Bupati Polewali Mandari 2015 dalam Pedoman Keterampilan Teknologi Desa No. 52, peneliti melaporkan, mereka menjajaki

penggunaan laporan yang dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaan laporan desa. Ada dua bagian, musim pertama dan musim kedua. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Said Nur (48 tahun), selaku kepala Desa

Paku, beliau menyatakan:

“tahap pelaporan dikerjakan dulu baru dilaporkan sesuai yang direalisasikan dilapangan baru diminta lagi untuk perealisasiannya untuk pembangunan tahap kedua. Ada dua tahapan pelaporannya, pelaporan LPJ dana desa baik itu APBD maupun ADD alhamdulillah tidak pernah terlambat karena jika terlambat maka dananya disetiap tahun dan disetiap tahapan tidak akan cair dan dapat dilihat bahwa dana desa di desa paku disetiap tahunnya cair”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan desa dilaporkan pada pemerintah daerah sesuai dengan apa yang direalisasikan dilapangan, baru diminta lagi untuk perealisasiannya untuk pembangunan tahap kedua. Pelaporan dana desa paku selama ini tepat sehingga dana desa paku selalu tercair dan tidak ada kendala selama ini.

Berdasar hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaporan dalam pendistribusian dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dana desa baik itu APBD desa di desa paku setiap tahun dicairkan.

4) Pertanggungjawaban

Tanggung jawab anggaran desa dipadukan dengan tanggung jawab anggaran terbelakang, sehingga tanggung jawab anggaran desa ditanggung oleh tanggung jawab. Penggunaan dana masyarakat harus formal dan sesuai, surat tugas (SPJ) akan disimpan oleh masyarakat sebagai subjek kunjungan, dan salinan kedua akan dikirimkan ke lingkungan sekitar.

Laporan respon desa Paku positif dan respon atas laporan tersebut telah dijawab dalam laporan dengan mengatakan telah diterima dengan baik oleh pemerintah daerah. Peneliti menemukan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) Paku digunakan untuk menyelidiki semua desa di wilayah Binuang. Akui ini bapak Aco (39 tahun), kepala urusan administrasi kecamatan, beliau menyatakan:

“Desa ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawab, selain selalu tepat waktu, LPJ desa paku telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan binuang dimana telah diketahui bahwa desa paku telah diakui sebagai desa yang baik dalam administrasi yang ditandai dengan mendapatkan juara pertama dalam lomba administrasi tingkat kecamatan”. (wawancara tanggal 29 desember 2020).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala urusan administrasi menunjukkan bahwa desa paku sebagai desa percontohan dikecamatan tersebut, karena laporan pertanggung jawaban tepat waktu dari seluruh desa desa yang ada dikecamatan binuang, dan juga memiliki administrasi yang baik. Hal yang sama pulah dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Hasan (42 tahun) selaku masyarakat desa paku, beliau mengatakan;

“Masalah dana desa baik itu APBDesa atau dana desa, pemerintah desa sudah transparan mengenai berapa jumlah dan perealisasiannya dana tersebut dapat dilihat dari baliho yang terpasang di depan kantor desa, baliho tersebut dirincikan sekian jumlah anggaran program-program yang akan dilaksanakan”. (wawancara tanggal 29 desember 2020)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa terbuka pada masyarakat desa mengenai dana desa, hal keterbukaan yang membuat masyarakat senang.

Laporan pertanggungjawaban dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak menyestakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga merupakan ruang terbuka pemerintah pemerintah dalam masyarakat, dan realitas cat kuku adalah responsivitas dari tindakan dan tindakan yang terencana dengan baik. Hal tersebut terlihat pada ketentuan kewajiban pelaporan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku

Namun juga dikatakan Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017), kebijakan melaksanakan atau melaksanakan kebijakan melalui program, kegiatan, kegiatan, atau kegiatan dengan cara yang berkaitan dengan sistem tertentu.

Pentingnya pengalokasian dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Paku juga terlihat pada faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan desa di Desa Paku. Peneliti menggunakan indikator faktor signifikan yang mempengaruhi alokasi dana masyarakat untuk penelitian dan menggunakan informasi referensi, sumber daya, dan organisasi perkantoran.

1) Komunikasi

Komunikasi didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi stres, untuk bekerja secara efektif, untuk memperkuat atau memberdayakan individu. Komunikasi merupakan bagian dari pengembangan suatu program dan merupakan bagian dari keberhasilan masyarakat, sehingga diperlukan komunikasi dalam suatu kelompok. Tanpa komunikasi yang baik, dapat

mengakibatkan organisasi yang buruk. Implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan manajer untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran dari kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran, dan meminimalkan risiko kinerja..

Kesejahteraan masyarakat di desa tergantung dari sejauh mana sistem pendistribusian dana desa tersebut, hasil dari salah satu informan Said Nur (48 tahun), selaku kepala Desa Paku, beliau menyatakan:

“sebelum kami menyusun program didesa, kami mengadakan sosialisasi mengenai dana desa dan program yang akan kami laksanakan, agar masyarakat mengetahui juga apa yang akan kami laksanakan dengan menggunakan dana desa”. (wawancara tanggal 28 desember 2020)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebelum menyusun perencanaan program dari dana desa, pihak pemerintahan desa melaksanakan sosialisasi mengenai dana desa dan program yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa melalui musyawarah bersama perangkat desa, kepala-kepala dusun dan tokoh masyarakat desa paku sehingga program tersebut matang dan bisa berjalan dengan baik. Dengan hal tersebut beliau menambahkan bahwa:

“setiap program yang akan kami laksanakan selalu kami utamakan sosialisasi dengan masyarakat”. (wawancara tanggal 28 desember 2020)

Dari pernyataan kepala desa mengatakan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan di desa paku selalu mengadakan sosialisasi, Hal ini sama dengan salah satu informan Kamaruddin (43 tahun) selaku kepala dusun tete, beliau menyatakan:

“setiap ada kegiatan yang akan dilakukan di desa, selalu pengurus desa mengadakan sosialisasi pada masyarakat”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari pernyataan tokoh masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pihak pengurus/pemerintahan desa selalu mengadakan sosialisasi mengenai dana desa dan program yang akan dilaksanakan di desa pada masyarakatnya dan sekaligus mengenai apa yang akan dilakukan kemudian hari untuk desa kedepan. Hal tersebut sama pulah dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Andi Naim (46 tahun), selaku kepala dusun dongi, beliau mengatakan;

“selalu pihak desa mengadakan sosialisasi pada kami didusun sini, sosialisasi mengenai dana desa dan program yang akan dilakukan desa”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Berdasar hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintahan desa mengadakan sosialisasi dana desa dan program yang akan dilaksanakan sampai didusun yang berada dibawah naungan desa paku. Kalau hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang Muis (41tahun) selaku masyarakat Desa Paku, beliau menyatakan bahwa:

“Selama saya ada di desa selalu ada rapat yang di adakan oleh kepala desa, tetapi yang selalu mengikuti rapat itu hanya kepala-kepala dusun bersama kepala desa”. (wawancara tanggal 28 desember, 2020).

Dari hasil wawancara bersama salah satu masyarakat menyatakan bahwa setiap kepala desa paku mengadakan sosialisasi melalui musyawarah selalu perwakilan saja, bukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat secara keseluruhan, berdasar hal tersebut bahwa sebagian masyarakat menginginkan kalau bisa rapat/sosialisasi dengan seluruh masyarakat desa paku, berarti ada sebagian masyarakat ingin terlibat dalam rapat/musyawah yang di adakan oleh desa. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Saleh Hasan (53 tahun selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

“saya selalu mengikuti musyawarah yang diadakan oleh pemerintahan desa, apa yang dibuat oleh desa untuk membangun desa menggunakan dana desa selalu ada sosialisasi, dari kami nanti kami sampaikan pada masyarakat secara langsung”. (wawancara tanggal 29 desember, 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemerintahan desa membangun menggunakan dana desa selalu ada sosialisasi pada masyarakat. Perwakilan dari masyarakat ter senang dengan adanya pembangunan, sebelum ada tersebut yang nantinya menyampaikan secara langsung pada masyarakat. pembangunan selalu ada sosialisasi pada masyarakat sebelum dibangun sesuatu didesa.

Berdasarkan data, observasi dan hasil wawancara dengan kepala desa, beberapa kepala dusun dan tokoh masyarakat bahwa ada sosialisasi dana desa melalui musyawarah, sosialisasi dilakukan sebelum pembangunan yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi mengenai dana desa melalui musyawarah telah memenuhi indikator komunikasi.

2) Sumberdaya

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pendistribusian Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paku. Sumber daya dalam penelitian ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, anggaran dan fasilitas. Tanpa sumber daya yang memadai, dapat dipastikan pelayanan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Kesejahteraan masyarakat di desa dari dana desa tergantung sejauh mana pendistribusian dana desa itu pada masyarakat di desa, sehingga hasil

wawancara peneliti dengan salah satu informan Said Nur (48 tahun), selaku kepala Desa Paku, beliau menyatakan:

“bentuk realisasi yang di lakukan di desa paku untuk pembangunan jalan, lampu jalan, gedung serbaguna desa, jembatan, dan mandi cuci kaskus (mck)”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk realisasi dana desa di desa paku untuk pembangunan jalan, lampu jalan, gedung serbaguna desa, jembatan, dan mandi cuci kaskus (mck) dengan adanya pembangunan sehingga adanya kesejahteraan masyarakat. Dengan program yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut peneliti mendapat hasil wawancara dari salah satu informan Hasan (48 tahun) selaku masyarakat paku, Beliau mengatakan bahwa:

“saya sudah merasakannya karena dengan adanya program dana desa aktivitas ke kebun sudah membaik dan adanya program di desa membuat ekonomi masyarakat menjadi lancar”. (wawancara tanggal 30 desember, 2020).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada manfaat yang dirasakan masyarakat dari program dana desa yang membuat masyarakat akses aktivitas ke kebun sudah mudah. Hal yang sama pula dikatakan oleh salah satu informan Kipli (50 tahun) selaku masyarakat dusun dusun laba laba, beliau mengatakan:

“saya sudah merasakan karena adanya program dana desa masyarakat sudah mulai meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur di kebun dan juga pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu jalan, gedung serbaguna, dan mandi cuci kaskus”. (wawancara tanggal 30 desember, 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya program dana desa masyarakat sudah mulai meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur di kebun dan juga pemberdayaan masyarakat

seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu jalan, gedung serbaguna, dan mandi cuci kaskus. Sama pula dengan hasil wawancara salah satu informan Henri (52 tahun) selaku masyarakat dusun dongi, beliau mengatakan;

“iya sudah merasakan dengan baik dana desa digunakan program pembangunan desa baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, fasilitas di dusun maupun desa juga dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi”. (wawancara tanggal 30 desember, 2020).

Dengan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan program pembangunan dana desa dari pembangunan fisik maupun nonfisik di dusun maupun desa, dengan adanya pembangunan tersebut harus ditingkatkan lagi. Hal yang sama pula dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan Sira (49 tahun) selaku masyarakat dusun teteh, beliau mengatakan;

“sudah membaik dan seharusnya lebih ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat untuk keluarga miskin”. (wawancara tanggal 30 desember, 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan program dana desa harus ditingkatkan lagi program-program pemberdayaan masyarakat untuk keluarga miskin, program dana desa untuk membangun desa dimana semua masyarakat yang berada di desa tersebut sama-sama merasakan dengan sama dari program dana desa. Hal yang sama pula dari hasil wawancara dengan salah satu informan Muh wahid (51 tahun), selaku masyarakat desa paku, beliau mengatakan;

“peningkatan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan di jalankan oleh pemerintah pelaksanaannya sudah tepat waktu mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya”. (wawancara tanggal 30 desember, 2020).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan program dana desa dapat meningkatkan akses layanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan di jalankan oleh pemerintah pelaksanaanya sudah tepat waktu mulai dari proses perancangan program sampai pada tahap pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa untuk indikator sumber daya dapat dikatakan baik, meskipun masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar tercipta pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Hal ini membuktikan bahwa dalam pendistribusian dana desa dalam mensejahteraan masyarakat desa telah memenuhi indikator sumber daya.

3) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi adalah sistem formal dari beberapa hubungan dan tugas dan pihak berkuasa untuk mengawal orang dan organisasi dan menyelaraskan tindakan mereka dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Robbins (1994) berpendapat bahawa struktur organisasi adalah sistem melaksanakan tugas yang akan diberikan, siapa yang melakukan apa dan melaporkan kepada siapa, mekanisme koordinasi formal dan corak interaksi yang harus diikuti. Sementara itu, Edward dalam Winarno (2007) menyatakan bahawa birokrasi adalah salah satu badan yang paling kerap, bahkan secara keseluruhannya adalah pelaksana dasar. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kehidupan moden.

Sangat sukar bagi pemerintah untuk mencegah pengaruh nilai dan kepentingan masyarakat yang harus mengutamakan perkhidmatan dan kepuasan pengguna program, kerana dalam pelaksanaan layanan awam yang dilakukan oleh pemerintah lebih monopoli, keinginan untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan cenderung kurang berkualiti. Lebih buruk lagi jika pentadbir negeri yang melaksanakan program memanfaatkannya untuk kepentingan lain atau untuk kepentingan peribadi / kumpulan tertentu. Menghadapi masalah mengutamakan kepuasan pelanggan dalaman, terutama kepuasan kepemimpinan organisasi atau harus mengutamakan kepuasan masyarakat yang lebih luas, semua ini adalah masalah yang biasanya timbul di bidang pelaksanaan perkhidmatan awam dalam pengagihan dana desa berdasarkan asas undang-undang yang digunakan dalam menguruskan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan Said Nur (48 tahun), selaku kepala Desa Paku, beliau menyatakan:

“di mulai dari terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang pengaturannya di mulai dari pasal 71 hingga pasal 75 selanjutnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang pengaturannya di mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan peraturan menteri dalam negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa paku mengikuti SOP yang di cantumkan dalam peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai pemerintah yang mengenai dana desa. Dari hal tersebut beliau menambahkan baha;

“Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman teknis pembangunan desa sebagai SOP kami juga dalam pendistribusian dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa kami”. (wawancara tanggal 28 desember 2020).

Berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam pendistribusian dana desa paku menggunakan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman teknis pembangunan desa sebagai SOP.

Dari hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis dapat dikatakan bahwa untuk indikator struktur birokrasi dapat dikatakan baik, dengan menggunakan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman teknis pembangunan desa sebagai SOP, meskipun masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar tercipta pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Hal ini membuktikan bahwa dalam pendistribusian dana desa dalam mensejahteraan masyarakat desa telah memenuhi indikator struktur birokrasi.

C. Pembahasan

1. Pengadministrasian Dalam Mendistribusikan Dana Desa Di Desa Paku.

Berdasarkan hasil investigasi pengelola terhadap alokasi dana masyarakat untuk masyarakat Paku, perencanaan yang baik dapat menunjukkan bahwa program dilaksanakan dengan baik dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Program akan mengambil dari kebutuhan, keinginan, kemampuan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Kelompok penggalangan dana masyarakat di desa Mih diawali dengan pembentukan kelompok dan masih dalam proses penyusunan model dengan

model partisipasi dalam pembahasan rencana pembangunan desa. Dengan bantuan kelompok pelaksana desa atau kelompok klasifikasi. Disebutkan dalam rencana tersebut, kepala desa bertanggung jawab atas kegiatan (PJOK), sekretaris desa mengawasi kewenangan desa (PJAK), bendahara daerah mengawasi keuangan. KUK), dan struktur komunitas. Di bawah kendali Desa Kuku. Dana partisipasi direncanakan melalui musrenbangdesa. Musrenbangdesa merupakan forum diskusi penerapan kegiatan pembangunan pedesaan yang dituangkan dalam rencana pembangunan masyarakat. Satu-satunya orang yang menghadiri rapat desa untuk merencanakan desa adalah kepala desa dan tim di bawah desa Paku.

Pelaksanaan semua pengeluaran dan pendapatan diselesaikan dengan dokumen yang baik menggunakan akun cadangan. Pelaksanaan Program Penanaman Modal Desa merupakan rangkaian kegiatan terkait program yang sedang berjalan dalam RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes harus sejalan dengan informasi pemerintah daerah, dan mulai melaksanakan program di kota dimulai dengan penyusunan RKP masyarakat, tetapi belum membentuk RKP Desa, harus memastikan biaya normal produk dan layanan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan. Alokasi dana di pedesaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kalender pemerintahan desa. Hal ini dapat menyebabkan banyak perubahan atau keterlambatan dalam pelaksanaan perencanaan dan operasional program. Faktor lainnya adalah belum adanya keserasian antara tujuan, rencana dan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan keuangan masyarakat di komunitas Paku. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian dengan

implementasi saat ini dari dokumen saat ini, di mana perangkat lunak dan aktivitas penting dari file RPJMDes tidak menyertakan izin program. Kesesuaian tujuan dan tanggung jawab serta keberhasilan program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai. Tanggung jawab ditentukan tidak hanya oleh hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Ada dua laporan berupa laporan kegiatan di balik layar APBDesa. Selama triwulan pertama, laporan pelaksanaan belanja di perdesaan, termasuk pelaksanaan laporan bank dari perdesaan setiap enam (enam) kali dan pelaksanaan belanja perdesaan di luar. Kedua, laporan tahunan, yaitu laporan kinerja cash back dalam 1 (satu) tahun buku. Penyerahan triwulanan dan laporan tahunan Matai desa melaporkan bahwa camat adalah sub-bagian dari kabupaten, dan camat melaporkan semua laporan yang disampaikan oleh kepala desa. . Di daerah yang dilaporkan ke Bupati melalui SKPD yang membawahi pemerintah daerah, laporan tersebut dikabarkan menjadi dasar penyaluran dana kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Polewali Mandar. Menerapkan sistem pelaporan dalam Pedoman Teknologi untuk Pengembangan Masyarakat di bawah Peraturan Manajemen Mandarin 2015 Polyval No.

Laporan respon desa Paku positif dan respon atas laporan tersebut telah dijawab dalam laporan dengan mengatakan telah diterima dengan baik oleh pemerintah daerah. Peneliti menemukan bahwa Laporan Tanggung Jawab Pemerintah Desa (LPJ) Paku digunakan untuk mensurvei seluruh desa di

wilayah Binuang. Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat desa atas dana yang didanai desa, yaitu untuk menghibur dan memuaskan masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku

Menurut kajian tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan, faktor penting yang mempengaruhi alokasi dana di luar kesejahteraan masyarakat Nih adalah implementasi atau penerapan hukum melalui kebijakan, program, kegiatan, tindakan atau kegiatan. . Dengan cara yang berhubungan dengan yayasan tertentu. Pemerintah daerah akan menggunakan uang lokal untuk membuat paku. Masyarakat senang dengan perkembangan tersebut sebelum menjadi yang pada akhirnya akan disampaikan langsung kepada masyarakat. Perkembangan seringkali sudah diatur sebelumnya tetapi tidak ada yang dibangun ke dalam komunitas. Melalui survei, pemantauan dan konsultasi dengan kepala desa, kepala desa dan kepala desa, keberadaan koneksi keuangan dari daerah pedesaan diperkuat melalui konsultasi, dan masyarakat memanfaatkan daerah pedesaan dengan baik sebelum pembangunan. Ini membuktikan bahwa perdagangan investasi di pedesaan melalui negosiasi telah mencapai taraf komunikasi.

Sumber daya dalam penelitian ini meliputi personel, alam, anggaran, dan perumahan. Tanpa sumber daya yang cukup, jelas bahwa layanan tidak akan digunakan secara efisien. Pembangunan jalan, lampu jalan, gedung multi guna outdoor, jembatan dan kamar mandi (MKK) akan menguntungkan masyarakat dengan berinvestasi di daerah pedesaan di Desa Nih. Di bawah program saat ini, semuanya berjalan dengan baik dan manfaatnya akan

dirasakan oleh masyarakat. Dengan sumber daya yang bermanfaat dari dana masyarakat, program dana masyarakat mulai meningkatkan akses ke taman dan meningkatkan perekonomian mereka dengan membangun infrastruktur di taman serta penguatan masyarakat. Misalnya konstruksi jalan, jembatan, lampu jalan, gedung multifungsi, dan kamar mandi. Program Dana Desa dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan sosial melalui pembangunan infrastruktur, juga meningkatkan perekonomian dan tata kelola masyarakat, mulai dari pelaksanaan program sampai dengan waktu pelaksanaan.

Menetapkan dasar sistem untuk melakukan penugasan kepadanya, siapa yang melaksanakannya, dan kepada siapa dia melapor, koordinasi formal metode, dan jaringan penghubung. Semua permasalahan tersebut muncul di bidang pelayanan publik untuk distribusi di pedesaan, berdasarkan common law yang biasa digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu paku akan mengikuti SOP, termasuk pemerintah federal. Keuangan Publik Aturan dan ketentuan pemerintah desa dan pemerintah dalam pengalokasian dana bajakan akan dijadikan SOP pedoman pembangunan pedesaan dari Peraturan Manajemen Polyval Mandar 2015 No. 52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dan temuan-temuan dilapangan mengenai pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di desa paku dan faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa paku dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengadministrasian dalam mendistribusikan dana desa di desa paku sudah cukup berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri dan peraturan bupati Polewali Mandar yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi pendistribusian dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa paku sudah cukup berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan di tata lebih baik lagi seperti komunikasi dalam hal sosialisasi dana desa pada masyarakat harus secara langsung dan tidak menggunakan perwakilan masyarakat yang hadir dalam sosialisasi dana desa tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di desa paku berkaitan dengan Efektivitas Pendistribusian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku maka peneliti menyarankan.

Dalam tahap pendistribusian dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lebih mengutamakan transparansi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam

kegiatan program yang perlu diutamakan adalah adanya musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh unsur yang ada di Desa paku, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan sebagainya.

Partisipasi aktif masyarakat bukan sekedar hanya formalitas belaka, tapi benar-benar menjadi kekuatan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, M. J., Jamal, M., & Dyastari, L. (2019). *Efektivitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kabupaten Paser*.
- Angipora, M. P. (2002). *Dasar-dasar pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharim, S. (2017). *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*. Kendari: Skripsi Universitas Halu Oleo.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Indrayani, D. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Ismayanti, L. (2015). *Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Keegan, W. J., & Schlegelmilch, B. B. (2001). *Global marketing management: A European perspective*. Pearson Education.
- Kertajaya, H. (2006). *Marketing Plus 2000/SC Siasat Memenangkan Persaingan Global*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kismono, G. (2001). *Bisnis pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Kotler, P. (1999). *Marketing management: the millennium edition* (Vol. 199). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Kurniawan, D. (2012). *Pelaksanaan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi pada Desa Kepatihon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.
- Kurniawan, R. C. (2017). *Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah*. *Fiat justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Maleong, L. (2007). *Metedologi penelitian*. PT. Remaja Rosda.
- Mauliddin, A. (2017). *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Moenir, A. S. (2000). *Public Service Management in Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazilla, R. U. (2019). *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pasolong, H. (2012). *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, A. (2018). *Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman*

- Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1135>
- Prijono, D., Soenarjanto, B., & Radjikan, R. (2018). *Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) Pada Perizinan Siup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Putra, A. S., & Mashur, D. (2014). Manajemen anggaran kas daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 218–223.
- Ruwaina, I. (2019). *Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*. UNNES.
- Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). In *Mandar Maju*.
- Siagian. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh Kepuasan Ker/Ja. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5183.7283>
- Sugiono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Ilmiah*.
- Swastha, B., & Irawan, D. H. (2003). Manajemen Pemasaran Modern, edisi kedua. *Yogyakarta: Liberty*.
- Widyastuti, A. (2012). Analisis hubungan antara produktivitas pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
 Umur :
 Jabatan :

Variabel Pengadministrasian Dalam Mendistribusikan Dana Desa Di Desa Paku.

1. Perencanaan

- e. Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menghadapi MUSRENBANGDES?
- f. Bagaimana rencana melakukan Musrenbangdes?
- g. Apakah semua masyarakat desa paku di undang untuk terlibat di MUSRENBANGDES?
- h. Apa yang dilakukan di dusun sebelum mengikuti MUSRENBANGDES?
- i. Apakah semua masyarakat dusun terlibat dalam MUSDUS?

2. Pelaksanaan

- 1) Apakah RPJMDes dan RKPDes mengikuti informasi dan program pemerintah daerah?
- 2) Apakah RKP disusun mengikuti standar harga barang dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau RKP disusun mengikuti standar harga barang dan jasa yang ada di pasar/toko?
- 3) Apakah dana desa masuk di rekening desa tepat pada waktu yang ditargetkan?

3. Pelaporan

- 1) Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pelaporan dana desa?

4. Pertanggungjawab

- a. Apakah laporan pertanggung jawaban dana desa tepat waktu?
- b. Apakah pemerintah desa transparan mengenai dana desa pada masyarakat?

Variabel Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paku

1. Komunikasi

1. Bagaimana sistem sosialisasi dana desa dengan masyarakat mengenai dana desa?
2. Bagaimana sosialisasi yang digunakan untuk menyusun suatu program desa?
3. Apakah sosialisasi dana desa pada semua masyarakat?

2. Sumberdaya

1. Apa saja fasilitas yang dibangun di desa paku menggunakan dana desa?
2. Apakah ada manfaat dari fasilitas yang sudah teralisasi terhadap masyarakat?
3. Apakah fasilitas yang dibangun menggunakan dana desa dapat merubah pertumbuhan ekonomi masyarakat?

3. Struktur Birokrasi

2. Apakah pihak pemerintahan desa paku mengikuti SOP yang di cantumkan dalam undang-undang, peraturan-peraturan mengenai dana desa?

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN





UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.249/FSP/UNIBOS/X/2020
 Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
 Kepala Desa Paku

Di-

Kabupaten Polman

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ahmad Saputra Imbar
 NIM : 45 16 021 045
 Judul penelitian : Efektivitas Pendistribusian Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paku, Kecamatan Benuang, Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.
 Tempat : Kantor Desa Paku
 Waktu : Oktober – Desember 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 06 Oktober 2020
 Dekan Fkip Unibos,



Arief Wicaksono, S.In, M.A
 NIDN 09271107602

Tembusan :
 1. Arsip

LAMPIRAN 2
SURAT SELASAI IZIN PENELITIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA PAKU**

Alamat : Jl. Ponds Polman - Plurang Desa Paku, Kode Pos 91351

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 42/DSP/02/2021

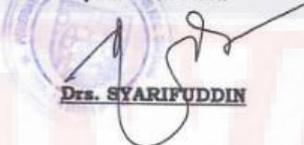
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD SAPUTRA IMBAR**
NPM : 4516021045
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BOSOWA

Telah selesai melaksanakan penelitian dari bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dengan syarat penyelesaian study yang berjudul : EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT di Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan bahan seperluhnya.

Paku, 17 Februari 2021
Kepala Desa Paku


Drs. SYARIFUDDIN

BOSOWA

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara Dengan Kepala Desa Paku



Wawancara Dengan Sekertaris Desa



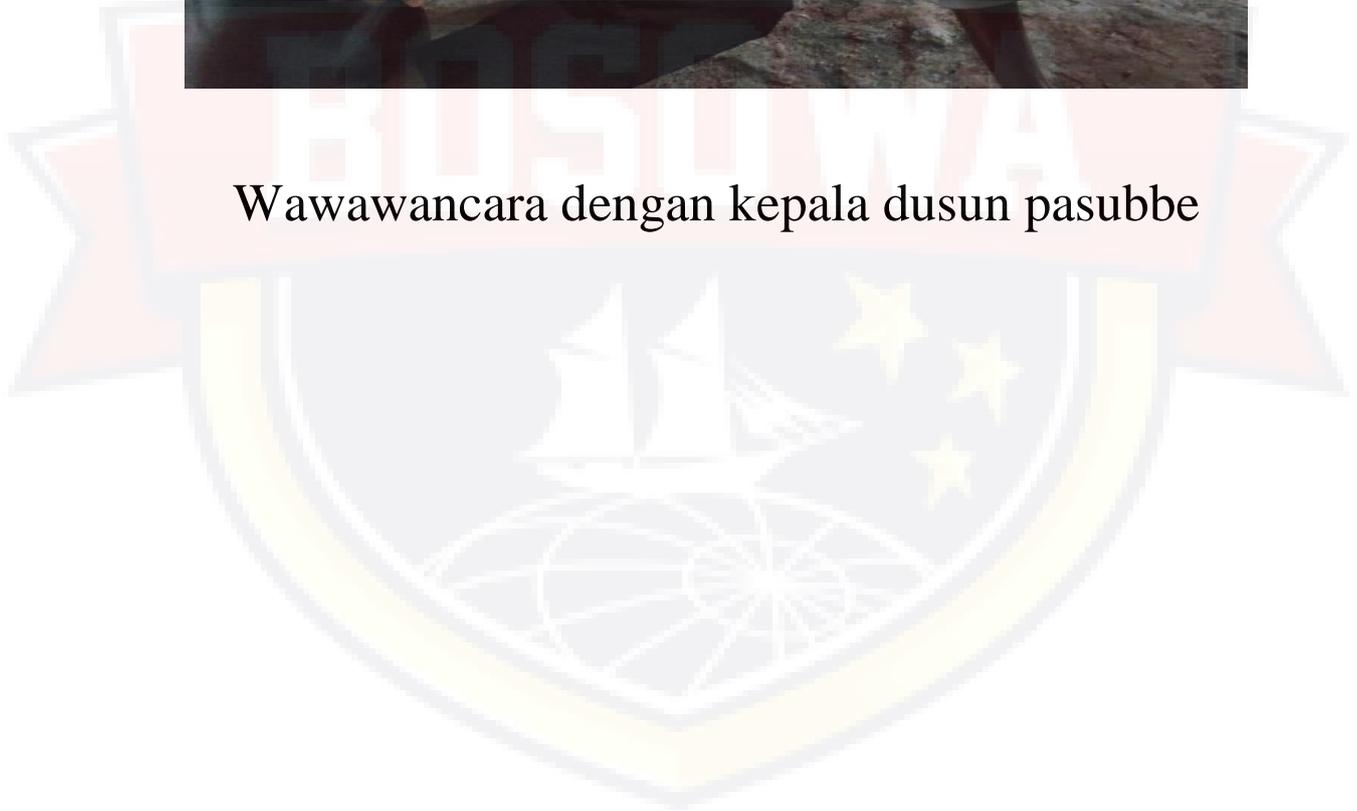
Wawawancara Dengan Bendahara Desa Paku



Wawancara Dengan Kepala Dusun Tete



Wawawancara dengan kepala dusun pasubbe



LAMPIRAN 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Paku (RKP-des)



BABARIBAN BERUSAHA BERSAMA PERBURUKAN DESA (BEBP DESA)

ZAROH 2019

DESA : PAKI
 KECAMATAN : HULUANG
 KABUPATEN : PULANGKAH BARAT
 PROVINSI : SULAWESI BARAT

No	Bidang		Kohor	Volume	Status/ Konflat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Peningkatan		Dana Peningkatan			Jumlah Pelaksanaan	
	a	b					1	2	3	4	5		
1	Peningkatan Desa	a	Desa Paki	12 Org	Perencanaan	Januari - Desember	1	250.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		b	Desa Paki	10 Org	Perencanaan	Januari - Desember	1	35.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		c	Desa Paki	1 TB	Perencanaan	Januari - Desember	1	70.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		d	Desa Paki	1 TB	Perencanaan	Januari - Desember	1	4.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		e	Desa Paki	1 TB	Perencanaan	Januari - Desember	1	7.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		f	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	3.360.000	ADP	1	1	1	PTSD
		g	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	50.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		h	Desa Paki	12 Org	Perencanaan	April - Juli	1	6.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		i	Desa Paki	12 Org	Perencanaan	April - Desember	1	2.000.000	ADP/APRD	1	1	1	PTSD
		j	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	3.000.000	ADP/ADP	1	1	1	PTSD
		k	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	1.000.000	ADP/APRD	1	1	1	PTSD
		l	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	4.000.000	ADP/ADP	1	1	1	PTSD
		m	Desa Paki	1 Paket	Perencanaan	April - Juli	1	17.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		n	Desa Paki	1 Unit	Perencanaan	April - Juli	1	27.000.000	ADP	1	1	1	PTSD
		o	Desa Paki	1 Unit	Perencanaan	April - Juli	1	35.000.000	ADP/ADP	1	1	1	PTSD
		p	Desa Paki	1 TB	Perencanaan	April - Juli	1	11.000.000	ADP	1	1	1	PTSD

Uraian	Masa Kerja Umum Lain-Lain	SDP M	Reorientasi Akses	Apr - Des	400.000.000	AP00/AP00H	Y	TPK
Jelajah Visual	Bekasum Digiart	7500 M	Masyarakat Umum	Apr - Des	50.000.000.000	AI00/AP00H	Y	PTPKD
Asosiasi Kelangkaan	Bekasum Digiart	20 Unit	Masyarakat Umum	Apr - Des	45.000.000	AE00/D0/AP00/AP00H	Y	PTPKD
Pengembangan Jalan Trail	Dusun Dagu	3000 M	Masyarakat Umum	Apr - Des	670.000.000	UE0/AP00H II	Y	PTPKD
Swagat Trail	Dusun Pambabe	1 Unit	Masyarakat Umum	Apr - Des	10.000.000	DU0/AP00H II	Y	TPK
Swagat Trail	Dusun Dagu	1 Unit	Masyarakat Umum	Apr - Des	20.000.000	EE0/AP00H II	Y	TPK
Lampiran Jalan	Dusun Dagu	5 Unit	Masyarakat Umum	Jan - Des	12.000.000	AI0	Y	TPK
Jalan Peleir	Umum Pesisir	2500 M	Masyarakat Umum	Jan - Des	620.000.000	EE0/AP00H II	Y	TPK
Programas Tumbuhan Mangrove di Pantai	Dusun Paksi	40 M	Masyarakat Umum	Jan - Des	1.200.000	EE0/AP00H II	Y	TPK
Montasidita Dusun Paksi	Dusun Paksi	1 Unit	Tang. Layanan Masyarakat	Apr - Des	35.000.000	AE0	Y	TPK
Pemertanian Group	Dusun Paksi	7 Unit	Pemertanian	Apr - Des	15.000.000	AI0	Y	TPK
Pembangunan Terpadu Desa	Dusun Paksi	3000 M	Masyarakat Umum	Jan - Des	720.000.000	EE0/AP00H II	Y	TPK
Pengembangan jalan desa/jalor pambabe	Dusun Paksi	3 Cng	Ting. Kualitas Perumahan	Jan - Des	7.000.000	AE0/IV/AP00/AP00H	Y	PTPKD
Pembelian material/keasir Desa	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	17.000.000	AI0/00	Y	TPK
Legislasi profilisasi kebanga (masyarakat PKL)	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	6.000.000	AI0/00	Y	TPK
Legislasi profilisasi Kemukiman	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	30.000.000	AE0/00	Y	TPK
Pembinaan Club Raga	Dusun Paksi	1 Unit	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	22.000.000	AE0/00/AP00	Y	TPK
Legislasi penyusunan atur atur Trail	Setelah Ditemui	2 Klp	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	10.000.000	AI0	Y	TPK
Legislasi Kebunapak Trail dan Perbaikan	Dusun Paksi	1 Paket	Ting. Layanan Masyarakat	Jan - Des	30.000.000	AI0	Y	TPK
Formasi Desa Selva (PT00)	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	10.000.000	AI0	Y	TPK
Pembinaan Kasejahteran Hutan	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	5.000.000	AI0	Y	TPK
Legislasi profilisasi kesehatan dan sosial budaya masyarakat	Dusun Paksi	1 Paket	Kebunapak masyarakat	Jan - Des	164.500.000	AI0	Y	TPK

Detail	Bentuk Dukung	Jumlah Dukung	Kelompok Masyarakat	Jan - Des	71.900.000	ADD/AD/AD/AD/AD/AD	✓	TPK
Alat Peningkatan dan pemeliharaan	Desa Paksi	1 Kip	Kelompok masyarakat	Jan - Des	20.000.000	ADD/AD/AD/AD/AD/AD	✓	TPK
RSK aspek kesehatan	Desa Paksi	500 liter	Kelompok masyarakat	Jan - Des	7.500.000	DEB	✓	TPK
RSK alat pemadam dan Ukang	Desa Paksi	17.000 liter	Kelompok masyarakat	Jan - Des	16.500.000	DEB	✓	TPK
Periode dupli	Desa Paksi	3 Kip	Kelompok masyarakat	Jan - Des	100.000.000	DEB/AD/AD I	✓	TPK
cadet senamring pasuk	Desa Paksi	10.000 Paket	Kelompok masyarakat	Jan - Des	130.000.000	DEB/AD/AD II	✓	TPK
Libur Panchajanya	Desa Paksi	2.000 Paket	Kelompok masyarakat	Jan - Des	60.000.000	DEB/AD/AD II	✓	TPK
Libur Dandan	Desa Paksi	2.000 Paket	Kelompok masyarakat	Jan - Des	60.000.000	DEB/AD/AD II	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	5 Unit	Kelompok masyarakat	Jan - Des	35.000.000	DEB/AD/AD II	✓	TPK
Senam	Desa Paksi	3 Unit	Kelompok masyarakat	Jan - Des	13.300.000	DEB/AD/AD II	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	2 Unit	Kelompok masyarakat	Jan - Des	17.300.000	AD/AD/AD	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	2 Unit	Kelompok masyarakat	Jan - Des	7.000.000	AD/AD/AD	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	150 Unit	Kelompok masyarakat	Jan - Des	3.750.000.000	AD/AD/AD	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	1 Paket	Kelompok masyarakat	Agustus	6.000.000	AD/AD/AD/AD	✓	TPK
Senam (trial)	Desa Paksi	1 Paket	Kelompok masyarakat	Agustus	30.000.000	AD/AD/AD	✓	TPK
Jumlah Per Bidang					5.138.900.000			
Jumlah TOTAL					35.108.124.000			

Jakarta
 Ditandatangani oleh:
 Tim Pengabdian Masyarakat
 ZAFARIZATI, S.Pd

Mengabdi
 kepada Desa,

 ZAFARIZATI, S.Pd